



# 2024

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**



**KOTA MATARAM  
TAHUN 2024**

# BAB I

## PENDAHULUAN

*Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)*

### 1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA. 2024 yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

Tahapan pengelolaan keuangan daerah dimulai melalui proses perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD juga disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2021 – 2026 yang mempunyai nilai antara lain 1) Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021–2026; 2) Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024; 3) Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kota Mataram Tahun 2021–2026; 4) Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Mataram Tahun 2024; dan 5) Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan misi yang dituangkan kedalam SEMBILAN poin NAWACITA yaitu : (1) peningkatan kualitas Manusia (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing (3) Pembangunan yang merata dan Berkeadilan (4) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa (6) Penegakan Sistem Hukum dan Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan demikian, KUA dan PPAS Pemerintah Kota Mataram berpedoman pada RKPD Tahun 2024 Kota Mataram yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD provinsi NTB Tahun 2024. Berdasarkan kondisi dan perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2023, tantangan dan target tahun 2024 serta diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 dan Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2024, maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2024 adalah:

**“MENDORONG TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN  
DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA BERKARAKTER DAN INFRASTRUKTUR  
BERKUALITAS MENUJU MATARAM HARUM”**

Makna dari tema pembangunan Kota Mataram tahun 2024 secara garis besar yang diarahkan disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan pencapaian indikator pembangunan dengan mempertimbangkan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026, hasil evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya maupun isu strategis yang menjadi perhatian serta selaras dan sinkron dengan Tema Pembangunan yang telah ditetapkan Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemenuhan akses pelayanan dasar tidak hanya mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun berupaya membangun kemandirian masyarakat sebagai upaya Pemerintah Kota Mataram dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan yaitu penurunan sebesar 1 % per tahun. Angka kemiskinan di Kota Mataram telah mencapai satu digit pada tahun 2022 yaitu sebesar 8.63%. Bahkan angka persentase penduduk miskin propinsi NTB belum mencapai angka satu digit pada tahun 2022 (13.68%) sesuai tabel berikut :

Tabel : 1.1

## Data Penduduk Miskin, Kota Mataram, Propinsi NTB dan Nasional

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022
Kota Mataram					
1	Garis Kemiskinan	Rupiah	499.959	524.762	562.661
2	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	41.800	44.450	45.300
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,47	8,65	8,63
Provinsi NTB					
1	Garis Kemiskinan	Rupiah	417.730	434.451	470.431
2	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	368.430	391.890	381.840
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,97	14,14	13,68
Nasional					
1	Garis Kemiskinan	Rupiah	471.822	489.848	521.494
2	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	26.420.000	27.540.000	26.160.000
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,78	10,14	9,54

Sumber: BPS Kota Mataram, 2022

Dari tabel tersebut dapat disampaikan bahwa masih terdapat jumlah penduduk miskin di Kota Mataram dan hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi Pemerintah Kota Mataram untuk menurunkan angka kemiskinan yang mana diharapkan angka kemiskinan dapat mencapai 0%. Kondisi Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity) atau Paritas Daya Beli.

Berdasarkan data BPS, angka Kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2022 sebesar 45.300 jiwa atau 8,63%. Untuk dapat mengeliminasi angka kemiskinan menjadi 0% di Kota Mataram sesuai dengan target nasional tersebut, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem oleh sebab itu perencanaan pembangunan di Kota Mataram tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian target pembangunan sesuai dengan tema tersebut yang secara teknis kebijakan pembangunan dijabarkan dalam KUA.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS sebagai salah satu tahap dalam proses penyusunan APBD adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Adapun informasi yang disajikan dalam PPAS adalah rencana pendapatan dan penerimaan, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara, dan rencana pembiayaan daerah, dan substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. PPAS disusun dengan muatan sebagai berikut:

1. sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2024;

Dalam upaya memenuhi kaidah regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam proses penyusunan PPAS telah dilakukan sinkronisasi program kegiatan di unit organisasi pelaksana beserta alokasi plafon anggaran yang bersifat sementara, baik untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan tugas rutin operasional Perangkat Daerah dapat berjalan dengan lancar dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Penentuan prioritas program dan plafon anggaran didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
2. Kemampuan untuk memperlancar atau akselerasi pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam KUA;
3. Ketersediaan sumberdaya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan.

Melalui penetapan PPAS Kota Mataram tahun 2024 diharapkan dapat mengakomodasi setiap permasalahan pembangunan di Kota Mataram pada tahun 2024. Selanjutnya PPAS akan menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kota Mataram Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyampaikan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan PPAS maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dituangkan dalam RKA yang

disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram.

## **1.2. TUJUAN**

Tujuan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Menetapkan plafon anggaran sementara prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RKPD Kota MataramTA. 2024 dan KUA TA. 2024.
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
- d. Sebagai acuan/pedoman dalam proses penyusunan RAPBD TA. 2024.

## **1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS Kota MataramTA. 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJP dan RPJM, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA. 2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 – 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor xxx Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.;Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026

26. Peraturan Walikota Mataram Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2024.
27. Peraturan Walikota Mataram Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram tahun 2024.

## **BAB 2**

# **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

*berisikan tentang target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam KUA.*

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2024, berdasarkan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah sebagai sumber keuangan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan; Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sementara Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang mana dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2024 dapat bersumber dari : SiLPA; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau; Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah, dimana semakin tinggi kualitas otonomi daerah maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

- a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

- (1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

- (a) Dana Bagi Hasil (DBH)

- i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
- ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- (1) DBH-Kehutanan;
- (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- (6) DBH-Perikanan;

- (b) Dana Alokasi Umum (DAU)

- (2) Dana Transfer Khusus

Pendapatan dana transfer khusus, meliputi :

- (a) DAK Fisik
- (b) DAK Non Fisik

- b) Dana Insentif Daerah

- c) Dana Otonomi Khusus
  - d) Dana Keistimewaan
  - e) Dana Desa
- 2) Transfer Antar Daerah
- a) Pendapatan Bagi Hasil
  - b) Bantuan Keuangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan bagi hasil dari pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta pendapatan lainnya. Selanjutnya Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari SILPA pada Tahun Anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Selaras dengan arah Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Mataram Tahun Anggaran 2024, target Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2024 dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2024

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.197.327.137.974,00</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>452.544.348.288,00</b>	Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010
4.1.01	Pajak Daerah	179.500.000.000,00	Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010
4.1.02	Retribusi Daerah	49.481.000.000,00	Perda Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.750.000.000,00	Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 Perda Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	212.813.348.288,00	Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2011 Perda Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.741.032.789.686,00</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,613,840,677,804,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.192.111.882,00	
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3,750,000,000,00</b>	

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
	<b>YANG SAH</b>		
	Hibah	3,750,000,000.00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2023

Berikut rincian terhadap sumber Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2024, yaitu:

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD Kota Mataram TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 452.544.348.288,00 mengalami peningkatan sebesar 14,39 persen atau naik sebesar Rp. 56.928.648.288 dari target PAD TA. 2023 sebesar Rp. 395,615,700,000.00 . Adapun rincian penerimaan dari PAD sebagai berikut:

#### 1.1. Pajak Daerah

Target Pendapatan Pajak Daerah di Kota Mataram bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada TA. 2024 target pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan umum, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan yang direncanakan mengalami kenaikan sebesar 11,63 persen atau naik sebesar Rp. 18.700.000.000,00 dari target TA. 2023 yaitu sebesar Rp. 160.800.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 179.500.000.000,00

Pendapatan Pajak Daerah secara rinci dijabarkan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
Target Pendapatan Pajak Daerah Kota Mataram Tahun 2024

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2023	APBD TA. 2024		
1	2	3	4	5	6
<b>4.1.01</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>160.800.000.000,00</b>	<b>179.500.000.000,00</b>	<b>18.700.000.000,00</b>	<b>11,63</b>
1	Pajak Hotel	24.000.000.000,00	26.000.000.000,00	2.000.000.000,00	8,33
2	Pajak Restoran	28.300.000.000,00	40.000.000.000,00	11.700.000.000,00	41,34
3	Pajak Hiburan	3.200.000.000,00	4.000.000.000,00	800.000.000,00	25,00
4	Pajak Reklame	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(16,67)
5	Pajak Penerangan Jalan	41.000.000.000,00	44.000.000.000,00	3.000.000.000,00	7,32
6	Pajak Parkir	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(33,33)
7	Pajak Air Bawah Tanah	1.300.000.000,00	1.500.000.000,00	200.000.000,00	15,38
8	PBB Perdesaan dan Perkotaan	28.000.000.000,00	30.000.000.000,00	2.000.000.000,00	7,14
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	26.000.000.000,00	27.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3,85

Sumber : TAPD Kota Mataram 2023

## 1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan dari Retribusi Daerah TA. 2024 direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.775.300.000,00 atau naik 7,63 persen dari target TA. 2023 yaitu sebesar Rp. 45,705.700,00.00 menjadi sebesar Rp. 49.481.000.000,00. Retribusi Daerah pada TA. 2024 yang direncanakan mengalami penurunan bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengujian Kendaraan, Retribusi Pelayanan Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan secara rinci proyeksi pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah untuk Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
Target Retribusi Daerah Kota Mataram Tahun 2024

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2023	APBD TA. 2024		
1	2	3	4	5	6
<b>4.1.02</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>45,705,700,000.00</b>	<b>49.481.000.000,00</b>	<b>3.775.300.000</b>	<b>8,26</b>
<b>1</b>	<b>Retribusi Jasa umum</b>	<b>37,745,000,000.00</b>	<b>41.354.000.000,00</b>	<b>3.609.000.000,00</b>	<b>8,73</b>
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6,000,000,000.00	4,354,000,000.00	(1,646,000,000.00)	(27.43)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10,000,000,000.00	14.000.000.000,00	4.000.000.000,00	40,00
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	11,000,000,000.00	15.500.000.000,00	4.500.000.000,00	40,91
	Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Los	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	-	
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	-	(2,000,000,000.00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	55,000,000.00	-	(55,000,000.00)	(100.00)
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,040,000,000.00	-	(1,040,000,000.00)	(100.00)
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00	-	(150,000,000.00)	(100.00)
<b>2</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3,710,700,000.00</b>	<b>3.927.000.000,00</b>	<b>216.300.000,00</b>	<b>5,83</b>
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	920,000,000.00	162,000,000.00	(758,000,000.00)	(82.39)
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	2,570,700,000.00	2,605,000,000.00	34,300,000.00	1.33
	Retribusi Rumah Potong Hewan	220,000,000.00	250,000,000.00	30,000,000.00	13.64
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga;	-	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
	Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	-	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2023	APBD TA. 2024		
1	2	3	4	5	6
3.	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>4,250,000,000.00</b>	<b>4,200,000,000.00</b>	<b>(50,000,000.00)</b>	<b>(1.19)</b>
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	-
	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	(100.00)
	Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-
	Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	200.000.000,00	200,000,000.00	-	-

Sumber : TAPD Kota Mataram, 2023

### 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA. 2024 direncanakan tidak ada perubahan sebesar Rp. 10.750.000.000,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2024 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD pada Lembaga Keuangan (PT Bank NTB Syariah dan PT. BPR NTB Mataram), Bidang Air Minum (Perseroda Air Minum Giri menang), dan Aneka Usah (PT. Jamkrida NTB). Rincian target pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Kota Mataram Tahun 2024

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2023	APBD TA. 2024		
1	2	3	4	5	6
4.1.03	<b>HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>10.750.000.000,00</b>	<b>10.750.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>				
	Lembaga Keuangan (PT. Bank NTB Syariah)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
	Lembaga Keuangan (PT. BPR NTB Mataram)	730.000.000,00	730.000.000,00	-	-
	Bidang Air Minum (PT. Air Minum Giri Menang)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	-
	Aneka Usaha (PT. Jamkrida NTB)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2023

#### 1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah; Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah; Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Pendapatan dari BLUD; dan Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada TA. 2024, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 212.813.348.288,00 naik sebesar Rp. 34.453.348.288,00 atau 16,19 persen dari TA. 2023 sebesar Rp. 178,360,000,000.00 dengan rincian sebagaimana berikut:

**Tabel 2.5**  
Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  
Kota Mataram Tahun 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2023	APBD TA. 2024		
1	2	3	4	5	6
<b>4.1.04</b>	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>178.360.000.000,00</b>	<b>212.813.348.288,00</b>	<b>34.453.348.288,00</b>	<b>16,19</b>
1.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	2,000,000,000.00	-	-
2.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	75,00
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	60.000.000,00	500.000.000,00	440.000.000,00	88,00
4.	Hasil dari Bangun Guna Serah	300.000.000,00	1,213,348,288.00	913,348,288.00	304.45
5.	Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	-
5.	Pendapatan dari BLUD	160.000.000.000,00	191,000,000,000.00	31,000,000,000.00	16.23
6.	Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	15.500.000.000,00	16,100,000,000.00	600,000,000.00	3,73

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2023

#### 2. Pendapatan Transfer

Pada TA. 2024 target Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp. 1.741.032.789.686,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 567.847.817.804,00 dari target pendapatan transfer TA. 2023 yaitu sebesar

Rp. 1,173,184,971,882.00 atau naik 32,62 persen. Peningkatan tersebut bersumber dari pendapatan transfer berupa peningkatan Dana Alokasi Khusus yang disesuaikan dengan usulan Pemerintah Kota Mataram pada TA 2024 melalui aplikasi KRISNA. Adapun rincian pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer TA. 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
Target Pendapatan Transfer Kota Mataram Tahun 2023 – 2024

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2023	APBD TA. 2024		
1	2	3	4	5	6
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,173,184,971,882.00</b>	<b>1.741.032.789.686,00</b>	<b>567.847.817.804,00</b>	<b>48,40</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1,045,992,860,000.00</b>	<b>1,613,840,677,804.00</b>	<b>567,847,817,804.00</b>	<b>35,19</b>
1	Dana Perimbangan	1,001,815,320,000.00	1,569,663,137,804.00	-	-
	A. Dana Transfer Umum	746,446,804,000.00	746,446,804,000.00	-	-
	B. Dana Transfer Khusus	255,368,516,000.00	823,216,333,804.00	567,847,817,804.00	68,98
2	Dana Insentif Daerah	44,177,540,000.00	44,177,540,000.00	-	-
<b>4.2.02</b>	<b>Transfer Antar-Daerah</b>	<b>127,192,111,882.00</b>	<b>127.192.111.882,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil	125,935,866,682.00	125.935.866.682,00	-	-
2	Bantuan Keuangan	1,256,245,200.00	1,256,245,200.00	-	-

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2023

### 2.1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Kota Mataram pada TA 2024 direncanakan antara lain bersumber dari:

1. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU)); dan Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik); dan
2. Dana Insentif Daerah.

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA. 2024 yaitu sebesar Rp. 1.741.032.789.686,00 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 567.847.817.804 atau 48.40 persen dari anggaran TA. 2023 sebesar Rp. 1.173.184.971.882.00, hal ini akan disebabkan meningkatnya Penerimaan Pendapatan dari pemerintah Pusat berupa peningkatan dana alokasi khusus yang

telah diusulkan melalui aplikasi KRISNA kepada Pemerintah Pusat TA. 2024. Secara rinci Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat TA. 2024 sesuai tabel 2.7

#### 2.1.1. Dana Perimbangan

Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 1,569,663,137,804.00 direncanakan meningkat sebesar Rp. 567.847.817.804.00 atau 56,68 persen dari anggaran TA. 2023 sebesar Rp. 1.001.815.320.000. Secara rinci proyeksi pendapatan Dana Perimbangan TA. 2024 sebagai berikut:

##### A. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 746,446,804,000.00 direncanakan tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Pajak, pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 105,085,267,000.00
2. . Secara rinci proyeksi dana Bagi Hasil Pajak TA. 2024 yaitu:
  - DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 2,077,705,000.00;
  - DBH dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi, pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 32,149,065.00;
  - DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 70,858,497,000.00.
3. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam, pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 24,993,650,000.00 terdiri dari:
  - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) direncanakan sebesar Rp. 44,549,,000.00;
  - Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty direncanakan sebesar Rp. 23,675,156,000.00;
  - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp. 1,273,945,000.00
4. Dana Alokasi Umum (DAU), pada TA. 2024 direncanakan tetap dengan rincian:
  - DAU direncanakan tidak mengalami perubahan dari target DAU Formula TA. 2024 yaitu sebesar Rp. 616,367,887,000.00 yang dirinci sebagai berikut :
    - a) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar

Rp. 544,847,369,000.00;

- b) DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 71,520,518,000,00; yang terdiri dari DAU formasi PPPK sebesar Rp. 18,994,560,000,00, DAU Pendanaan Kelurahan sebesar Rp. 10,000,000,000.00, DAU Bidang Kesehatan sebesar Rp. 35,225,958,000,00, DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp. 7,300,000,000.00.

Secara rinci target pendapatan Dana Transfer Umum TA. 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.7**

Target Pendapatan Dana Transfer Umum Kota Mataram Tahun 2024

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2023	APBD TA. 2024		
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>746,446,804,000.00</b>	<b>746.446.804.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	<b>Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak</b>	<b>105,085,267,000.00</b>	<b>105,085,267,000.00</b>	-	-
	DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB)	2,077,705,000.00	2,077,705,000.00	-	-
	Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	32,149,065,000.00	32,149,065,000.00	-	-
	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)	70,858,497,000.00	70,858,497,000.00	-	-
2	<b>Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam</b>	<b>24,993,650,000.00</b>	<b>24,993,650,000.00</b>	-	-
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	44,549,000.00	44,549,000.00	-	-
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	23,675,156,000.00	23,675,156,000.00	-	-
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,273,945,000.00	1,273,945,000.00	-	-
3	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>616,367,887,000.00</b>	<b>616,367,887,000.00</b>	-	-
	DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	544,847,369,000.00	544,847,369,000.00	-	-
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	-
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian	18,994,560,000.00	18,994,560,000.00	-	-
	DAU Bidang Kesehatan	35,225,958,000.00	35,225,958,000.00		
	DAU Bidang Pekerjaan Umum	7,300,000,000.00	7,300,000,000.00		

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2023

B. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 823.216.333.804,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 567,847,817,804.00 atau 68,98 persen dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp 665,742,749,804.00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 567,847,817,804.00 atau 85.30 persen, Kenaikan ini masih bersifat sementara yang menggunakan proyeksi atas usulan Pemerintah Kota Mataram melalui aplikasi KRISNA yang terdiri dari :
  - DAK Reguler, pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 665,742,749,804.00
  - DAK Penugasan, pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 0
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, pada TA. 2024 direncanakan sama pad TA. 2023 sebesar Rp. 157,473,584,000.00.

Secara rinci target pendapatan Dana Transfer Khusus TA. 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.8**

Target Pendapatan Dana Transfer Khusus Kota Mataram Tahun 2023 – 2024

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-
		APBD TA. 2023	APBD TA. 2024	
1	2	3	4	5
<b>B</b>	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>255,368,516,000.00</b>	<b>823,216,333,804.00</b>	<b>567,847,817,804.00</b>
a)	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97,894,932,000.00	665,742,749,804.00	567,847,817,804.00
1	Dana Alokasi Khusus Reguler	97,894,932,000.00	665,742,749,804.00	567,847,817,804.00
	Bidang Pendidikan	25,481,819,000.00	37,342,660,000.00	11,860,841,000.00
	Bidang Kesehatan dan KB	46,412,123,000.00	423,254,217,100.00	376,842,094,100.00
	Bidang Sanitasi	6,962,818,000.00	7,600,000,000.00	637,182,000.00
	Bidang Perumahan dan Permukiman	-	41,358,730,000.00	41,358,730,000.00
	Bidang Jalan	-	-	-
	Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi	1,395,000,000.00	1,395,000,000.00	-
	DAK Pembangunan Pasar Rakyat (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas)	-	74,999,998,260.00	74,999,998,260.00
	Bidang Kelautan dan Perikanan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	-
	Bidang I ndustri Kecil dan Menengah	4,414,934,000.00	18,142,996,400.00	13,728,062,400.00

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-
		APBD TA. 2023	APBD TA. 2024	
1	2	3	4	5
	Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata			
	Bidang Pariwisata	10,739,804,000.00	21,648,018,044.00	10,908,214,044.00
	Bidang Lingkungan Hidup	1,108,434,000.00	1,108,434,000.00	-
	DAK UMKM (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas)	-	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
<b>2</b>	<b>DAK Penugasan</b>	-	-	-
	Bidang Kesehatan dan KB	-	-	-
	Bidang Sanitasi	-	-	-
	Bidang Perumahan dan Permukiman	-	-	-
	Bidang Irigasi	-	-	-
	Bidang Pertanian	-	-	-
	Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-
	Bidang Industri Kecil dan Menengah	-	-	-
	Bidang Pariwisata	-	-	-
	Bidang Jalan - Bidang Keselamatan Jalan	-	-	-
	Bidang Jalan – Bidang Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan sentra Industri Kecil dan Menengah	-	-	-
<b>b)</b>	<b>DAK Non Fisik</b>	<b>157.473.584.000,00</b>	<b>157.473.584.000,00</b>	<b>-</b>
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	5.368.830.000,00	5.368.830.000,00	-
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.227.590.000,00	1.227.590.000,00	-
	Tunjangan Profesi Guru	64.307.513.000,00	64.307.513.000,00	-
	Tambahan Penghasilan Guru	2.679.750.000,00	2.679.750.000,00	-
	Bantuan Operasional Sekolah	63.723.960.000,00	63.723.960.000,00	-
	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB	14.447.025.000,00	14.447.025.000,00	-
	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	410.170.000,00	410.170.000,00	-
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-
	Dana Pelayanan Kepariwisata	1.227.371.000,00	1.227.371.000,00	-
	Dana Fasilitas Penanaman Modal	313.000.000,00	313.000.000,00	-
	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	579.575.000,00	579.575.000,00	-
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	-
	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan IKM	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	-

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2023

### 2.1.2. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah pada TA. 2024 direncanakan tidak mengalami peningkatan sebesar Rp. 44.177.540.000,00 atau direncanakan sama dengan tahun anggaran 2023 sambil menunggu informasi dana transfer dari Kementerian Keuangan RI untuk TA. 2024.

## 2.2. Transfer Antar-Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah TA. 2024 yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuangan direncanakan sama dari target Pendapatan Transfer Antar Daerah TA. 2023 sebesar Rp. 127,192,111,882. dengan rincian yaitu:

1. Pendapatan Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil dari Pajak Rokok; pada TA. 2024 pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 125.935.866.682,00.
2. Bantuan Keuangan terdiri dari Bantuan Keuangan Umum dari Daerah Provinsi, Bantuan Keuangan Khusus dari Daerah Provinsi, Bantuan Keuangan Umum dari Daerah Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan Khusus dari Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 diharapkan sama pada TA. 2023 sebesar Rp. 1,256,245,200.00 yang diperuntukkan bagi sharing pembayaran BPJS Kesehatan guna mendukung UHC Pemerintah Kota Mataram.

## 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 3.750.000.000,00 sama seperti TA. 2023 yang diperuntukkan Hibah Sanitasi Limbah Setempat sebesar Rp. 1,500,000,000.00 dan dan Hibah Saluran Air Minum Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp. 2,250,000,000.00. Penganggaran tersebut dapat berubah setelah diterimanya informasi hibah dari Pemerintah Pusat.

# **BAB 3**

## **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

*Memuat penjelasan mengenai Sinergitas Program Pemerintah Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah, dan Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.*

### **1. SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KOTA MATARAM TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

Rencana Kerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2024 adalah “Mendorong Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Didukung Sumber Daya Manusia Berkarakter Dan Infrastruktur Berkualitas Menuju Mataram Harum”, sehingga memiliki sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3%-5,9% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2,0 - 4,0;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 7,5% - 8,5%, IPM menjadi 73,31 -73,-49, gini rasio pada kisaran 0,375 - 0,378, tingkat pengangguran terbuka 5,3% - 6,0%, dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2024 ditetapkan disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan pencapaian indikator pembangunan dengan mempertimbangkan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026, hasil evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya maupun isu strategis yang menjadi perhatian serta selaras dan sinkron dengan Tema Pembangunan yang telah ditetapkan Pusat dan Pemerintah Provinsi. Untuk itu, Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2024 adalah “Mendorong Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan didukung Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Infrastruktur Berkualitas Menuju MATARAM HARUM”. RKPD Kota Mataram Tahun 2024 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian Visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026 yaitu : “ TERWUJUDNYA MATARAM YANG HARUM HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI “ yang memiliki arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 yaitu : 1) Transformasi Ekonomi, 2) Pengembangan Infrastruktur Publik yang Inklusif, dan 3) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter.

Dari arah kebijakan tersebut dapat diuraikan terhadap masing-masing arah kebijakan dengan menetapkan strategi pembangunan sebagai berikut :

1. Transformasi Ekonomi, dengan strategi pembangunan pada tahun 2024, yaitu: penguatan peran UMKM, pembangunan sektor pariwisata, pemenuhan infrastruktur penunjang ekonomi unggulan, perluasan penyediaan lapangan usaha serta penguatan pemanfaatan inovasi dan TIK;
2. Pengembangan Infrastruktur Perkotaan yang Inklusif, dengan strategi pembangunan pada tahun 2024, yaitu: meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur perkotaan, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan resiko bencana, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital;
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, dengan strategi pembangunan pada tahun 2024, yaitu: meningkatkan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan berkarakter, memperkuat sistem kesehatan daerah dan sistem jaminan sosial, meningkatkan peran pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dari arah kebijakan tersebut merupakan sinkronisasi dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 yang dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional tersebut merupakan agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJM Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Secara rinci sasaran dari masing-masing Prioritas Nasional disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran PN 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (1) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (2) skor pangan harapan, serta (3) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;

- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (1) rasio kewirausahaan nasional, (2) pertumbuhan PDB pertanian, (3) pertumbuhan PDB perikanan, (4) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (5) kontribusi PDB industri pengolahan, (6) nilai devisa pariwisata, (7) kontribusi PDB pariwisata, (8) penyediaan lapangan kerja per tahun, (9) pertumbuhan investasi (PMTB), (10) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (11) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (12) rasio perpajakan terhadap PDB.
2. Sasaran PN 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”, sebagai berikut:
    - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (1) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (3) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
    - b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (1) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KBI, (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KBI, serta (3) penurunan persentase penduduk miskin KBI.
  3. Sasaran PN 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”, sebagai berikut:
    - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (1) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (2) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
    - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (1) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (2) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
    - c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (1) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (2) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (3) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (4) menurunkan insidensi tuberculosis, (5) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (6) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (7) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (8) menurunkan

persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (9) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (10) rata-rata sekolah penduduk usia 15 tahun keatas, dan (11) harapan lama sekolah;

- d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (1) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (2) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (3) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
  - e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
  - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (1) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah keatas, (2) jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang masuk dalam world class university, (3) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat Global Innovation Index.
4. Sasaran PN 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, sebagai berikut :
- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (1) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (2) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
  - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pemabngunan Kebudayaan;
  - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
  - d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
  - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (1) Indeks Pembangunan Keluarga dan (2) median usia kawin pertama perempuan;
  - f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.
5. Sasaran PN 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (1) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (2) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (3) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (4) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
  - b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (1) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km), (2) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (3) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (4) peningkatan persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara;
  - c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (1) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
  - d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagakerjaan dengan mendorong peningkatan (1) rasio elektrifikasi, (2) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (3) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
  - e. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).
6. Sasaran PN 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”, sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
  - c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (1) persentase penurunan emisi GRK, dan (2) persentase penurunan intensitas emisi GRK.
7. Sasaran PN 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatnya (1) Indeks Demokrasi Indonesia, dan (2) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- b. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
- c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Hukum;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan Indeks Pelayanan Publik Nasional;
- e. Terjaganya keutuhan wilayah NKRI dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya

Terhadap prioritas nasional Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 guna mendukung kelanjutan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden, Pemerintah Pprovinsi dan Pemerintah Kkabupaten/Kota harus mendukung tercapainya **tujuh prioritas pembangunan nasional** sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, meliputi:

**A. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**, diakomodir melalui urusan program yaitu :

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.  
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
  - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
  - b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
  - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
  - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
  - a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
  - b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
  - c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
  - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
  - b. Program Pemasaran Pariwisata.
  - c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
  - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
  - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
  - c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
  - e. Program Penyuluhan Pertanian
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
  - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

**B. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**, diakomodir melalui urusan program yaitu :

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  - a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
  - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
  - d. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.
  - e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
  - f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
  - g. Program Pengembangan UMKM.
- 2) Unsur Sekretariat Daerah.  
Program Perekonomian dan Pembangunan.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
- a. Program Pengelolaan Pendidikan.
  - b. Program Pengembangan Kurikulum.
  - c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
- 4) Unsur Penelitian dan Pengembangan.  
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
  - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
  - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
  - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
  - c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
  - d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
  - e. Program Penataan Bangunan Gedung.
  - f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
  - g. Program Penyelenggaraan Jalan.
  - h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
  - i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- a. Program Pengembangan Perumahan.
  - b. Program Kawasan Permukiman
  - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  - b. Program Penanggulangan Bencana.
  - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- a. Program Pemberdayaan Sosial.
  - b. Program Rehabilitasi Sosial.
  - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
  - d. Program Penanganan Bencana.
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
  - b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
  - d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
  - e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
  - f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
  - g. Program Pengelolaan Persampahan.

**C. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,** diakomodir melalui urusan program yaitu :

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- a. Program Pengendalian Penduduk.
  - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
  - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- a. Program Pendaftaran Penduduk.
  - b. Program Pencatatan Sipil.
  - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
  - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  - b. Program Penanggulangan Bencana.
  - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

- a. Program Pemberdayaan Sosial.
  - b. Program Rehabilitasi Sosial.
  - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
  - d. Program Penanganan Bencana.
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
  - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
  - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
- a. Program Pengelolaan Pendidikan.
  - b. Program Pengembangan Kurikulum.
  - c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
  - b. Program Perlindungan Perempuan.
  - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
  - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
  - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
  - f. Program Perlindungan Khusus Anak.
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
  - b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
  - c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - b. Program Penempatan Tenaga Kerja.
  - c. Program Hubungan Industrial.
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
  - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
  - c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
  - d. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.
  - e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
  - f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

- g. Program Pengembangan UMKM.
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
  - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
  - b. Program Promosi Penanaman Modal.
  - c. Program Pelayanan Penanaman Modal.
  - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
  - a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
  - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
  - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
  - d. Program Pengembangan Ekspor.
  - e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
  - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
- 14) Unsur Sekretariat Daerah.  
Program Perekonomian dan Pembangunan.
- 15) Unsur Kewilayahan (Kecamatan).  
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

**D. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**, diakomodir melalui urusan program yaitu :

- 1) Unsur Kepegawaian.  
Program Kepegawaian Daerah.
- 2) Urusan Pemerintahan Umum.
  - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
  - c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  - d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
  - e. Program Keningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
  - a. Program Pengelolaan Pendidikan.
  - b. Program Pengembangan Kurikulum.
  - c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

- 4) Unsur Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - a. Program Pendaftaran Penduduk.
  - b. Program Pencatatan Sipil.
  - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
  - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
- 5) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
  - a. Program Pengembangan Kebudayaan.
  - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
  - c. Program Pembinaan Sejarah.
  - d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- 6) Unsur Sekretariat Daerah.  
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

**E. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**, diakomodir melalui urusan program yaitu :

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
  - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
  - c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
  - d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
  - e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
  - f. Program Pengembangan Permukiman.
  - g. Program Penataan Bangunan Gedung.
  - h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
  - i. Program Penyelenggaraan Jalan.
  - j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
  - k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - a. Program Pengembangan Perumahan.
  - b. Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.\*\*)
  - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
  - d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 3) Unsur Kewilayahan (Kecamatan).  
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.\*\*)
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.  
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
  - a. Program Informasi dan Komunikasi Publik.
  - b. Program Aplikasi Informatika.

**F. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**, diakomodir melalui urusan program yaitu :

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
  - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
  - b. Program Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
  - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  - e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH).
  - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
  - g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
  - h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
  - i. Program Pengelolaan Persampahan.
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
  - a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  - b. Program Penanggulangan Bencana.
  - c. Program Penanggulangan Kebakaran.

**G. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik**, diakomodir melalui urusan program yaitu :

- 1) Unsur Kepegawaian.  
Program Kepegawaian Daerah.
- 2) Unsur Sekretariat Daerah.  
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 3) Urusan Pemerintahan Umum.
  - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
  - c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
  - e. Program Keningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- 4) Unsur Sekretariat DPRD.
    - a. Program Layanan dan Administrasi Keuangan.
    - b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
  - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
    - a. Program Informasi dan Komunikasi Publik.
    - b. Program Aplikasi Informatika.
  - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
    - a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
    - b. Program Penanggulangan Bencana.
    - c. Program Penanggulangan Kebakaran.
  - 7) Unsur Perencanaan
    - a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
    - b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 8) Unsur Keuangan
    - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
    - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
    - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - 9) Unsur Pengawasan
    - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
    - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

RKPD 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan tahapan pertama RKPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru yang disebutkan dalam diktum kesatu huruf a bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai rencana pembangunan Daerah Propinsi Tahun 2024-2026 dengan menggambarkan sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dengan memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan 7 (tujuh) prioritas daerah yang terbagi dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah yaitu :

1. Terwujudnya NTB sebagai lokomotif pertumbuhan Ekonomi Regional Bali dan Nusa Tenggara yang Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Terwujudnya Peningkatan Pembangunan Manusia;
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Asri;
4. Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri;
5. Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
6. Terwujudnya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's);
7. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing.

Sinergitas program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat disampaikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel. 3.1**  
**SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KOTA MATARAM TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1		<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase SDM Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas		
				DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	410.234.525,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Usaha mikro yang naik kelas		
				DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.115.378.800,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase pertumbuhan omzet per UMKM		
				DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.077.511.950,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri		
				DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	22.766.270.252,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	57.726.429,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Pertumbuhan nilai tambah perikanan tangkap		
				DINAS PERIKANAN	1.419.718.470,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Rata-Rata Lama Tinggal		
				DINAS PARIWISATA	24.628.160.167,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			persentase sarana pertanian yang disediakan		
				DINAS PERTANIAN	1.660.369.343,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi baik		
				DINAS PERTANIAN	1.864.260.046,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH		
				DINAS PERTANIAN	101.988.810,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase bencana pertanian yang dikendalikan		
				DINAS PERTANIAN	24.259.964,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepuasan pelayanan SKPD		
				DINAS PERTANIAN	10.731.533.505,00
2	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</b>				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Fasyankes yang terakreditasi		
				DINAS KESEHATAN	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan RSUD Kota Mataram		
				RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	30.818.302.905,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase tenaga terampil bersertifikat		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	117.429.267,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial		
				DINAS SOSIAL	435.102.339,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS yang dapat berfungsi sosial secara wajar		
				DINAS SOSIAL	335.440.103,00
			Persentase PMKS yang dapat berfungsi sosial secara wajar		
				DINAS SOSIAL	704.878.789,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase PMKS yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial		
				DINAS SOSIAL	1.034.970.376,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Sosial Kota Mataram		
				DINAS SOSIAL	531.011.107,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang dipenuhi oleh perusahaan		
				DINAS TENAGA KERJA	36.250.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	361.176.772,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan DPMPTSP Kota Mataram		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	6.282.829.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Jumlah pengguna Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	132.034.408,00
			"Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis dan Pengelolaan Arsip Dinamis		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	55.017.985,00
			Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis dan Pengelolaan Arsip Dinamis.		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	89.434.747,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.386.268.730,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				KECAMATAN MATARAM	673.356.386,00
			IKM Kelurahan		
				KECAMATAN MATARAM	673.356.386,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				KECAMATAN MATARAM	1.620.384.676,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				KECAMATAN MATARAM	1.620.384.676,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan		
				KECAMATAN MATARAM	282.872.314,00
			Persentase penyelesaian permasalahan tratribunlinmas di kecamatan		
				KECAMATAN MATARAM	282.872.314,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				KECAMATAN MATARAM	8.434.589.772,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN SELAPARANG	300.999.900,00
			IKM Kecamatan		
				KECAMATAN SELAPARANG	22.481.300,00
			IKM Kelurahan		
				KECAMATAN SELAPARANG	323.481.200,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentaase kelurahan berpredikat swasembada		
				KECAMATAN SELAPARANG	6.499.900,00
			Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				KECAMATAN SELAPARANG	353.190.367,00
			Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				KECAMATAN SELAPARANG	6.499.900,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				KECAMATAN SELAPARANG	353.190.367,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan		
				KECAMATAN SELAPARANG	212.531.300,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		
				KECAMATAN SELAPARANG	212.531.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Kecamatan		
				KECAMATAN SELAPARANG	224.997.250,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				KECAMATAN SELAPARANG	189.640.113,00
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				KECAMATAN SELAPARANG	8.862.519.996,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Mataram Barat	477.638.288,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Mataram Barat	477.638.288,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Mataram Barat	15.817.080,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Monjok Timur	
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Monjok Timur	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Monjok Timur	25.622.400,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Dasan Agung	142.118.836,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Dasan Agung	142.118.836,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan.		
				Kelurahan Dasan Agung	0,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		
				Kelurahan Dasan Agung	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Dasan Agung	27.720.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Dasan Agung Baru	417.330.272,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Dasan Agung Baru	417.330.272,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan.		
				Kelurahan Dasan Agung Baru	0,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		
				Kelurahan Dasan Agung Baru	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Dasan Agung Baru	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Karang Baru	
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Karang Baru	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Karang Baru	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Gomong	41.094.616,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Gomong	41.094.616,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Gomong	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Monjok Barat	509.513.327,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Monjok Barat	509.513.327,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan.		
				Kelurahan Monjok Barat	0,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Monjok Barat	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Monjok Barat	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Rembiga	
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Rembiga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Rembiga	31.320.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Pagutan Barat	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pagutan Barat	1.092.494,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pagutan Barat	632.582.586,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pagutan Barat	632.582.586,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pagutan Barat	205.011.192,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Punia	730.506,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Punia	730.506,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Punia	460.634.040,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Punia	460.634.040,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Punia	270.487.848,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Pagutan	2.520.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pagutan	2.520.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pagutan	567.393.786,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pagutan	567.393.786,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pagutan	276.050.760,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Pagesangan Barat	1.800.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pagesangan Barat	1.800.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pagesangan Barat	519.349.898,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pagesangan Barat	519.349.898,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pagesangan Barat	274.767.840,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Pagutan Timur	1.416.040,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pagutan Timur	1.416.040,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pagutan Timur	506.535.380,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pagutan Timur	506.535.380,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pagutan Timur	203.418.184,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Pagesangan Timur	1.133.528,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pagesangan Timur	1.133.528,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pagesangan Timur	722.893.282,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pagesangan Timur	722.893.282,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pagesangan Timur	142.078.168,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Mataram Timur	835.182,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Mataram Timur	835.182,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Mataram Timur	460.555.214,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Mataram Timur	460.555.214,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Mataram Timur	135.678.306,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Pagesangan	1.161.038,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pagesangan	1.161.038,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Pagesangan	570.592.436,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pagesangan	570.592.436,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pagesangan	153.114.064,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pejanggik	1.300.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pejanggik	637.504.482,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pejanggik	637.504.482,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pejanggik	78.469.000,00
<b>3</b>	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>				
			Indeks kepuasan pelayanan SKPD		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.397.826.797,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			IKM PERPUSTAKAAN		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.268.843.783,00
			TINGKAT KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN PER HARI		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.268.843.783,00
<b>4</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b>				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi Rumah Sakit		
				RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	433.257.938.078,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan RSUD Kota Mataram		
				RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	202.580.750.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase akses air minum yang layak dan aman		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.393.578,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase rumah tangga dengan pengelolaan air limbah domestik		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.066.130.091,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase Bangunan yang memenuhi sertifikat laik fungsi (SLF)		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	370.251.415,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.129.468.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37.417.677.366,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			persentase luas peruntukan lahan existing yang sesuai dengan RTRW		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	930.719.408,00
			Persentase Pemanfaatan Pola Ruang Yang Sesuai RTR		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	210.616.510,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	575.302.826,00
			Rasio kepemilikan rumah		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	144.437.321,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Luas Kawasan Kumuh		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	59.780.009.788,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Persentase Penanganan kawasan tidak kumuh		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	700.525.000,00
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Tingkat tertib administrasi pertanahan		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52.999.791,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas PKP		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.468.525.595,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Rasio fatalitas per 10.000 kendaraan		
				DINAS PERHUBUNGAN	1.077.861.810,00
			Rasio konektivitas kota		
				DINAS PERHUBUNGAN	1.077.861.810,00
			Rasio Waktu Tempuh		
				DINAS PERHUBUNGAN	1.077.861.810,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Infrastruktur Wilayah		
				DINAS PERHUBUNGAN	507.942.561,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan		
				DINAS PERHUBUNGAN	507.942.561,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Nilai aspek layanan publik berbasis elektronik		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.381.402.908,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Nilai Aspek 6 Audit TIK		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.102.999.680,00
			Nilai Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.102.999.680,00
			Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.102.999.680,00
			Nilai Aspek Penyelenggara SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.102.999.680,00
			Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.102.999.680,00
			Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.102.999.680,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	414.997.207,00
			Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	414.997.207,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Nilai aspek audit TIK		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	249.999.766,00
			Nilai aspek kebijakan internal terkait tata Kelola SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	249.999.766,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	249.999.766,00
			Nilai aspek penyelenggaraan SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	249.999.766,00
			Nilai Aspek Penyelenggaraan SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	249.999.766,00
			Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	249.999.766,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan Perangkat Daerah		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	374.116.879,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	115.019.712,00
			Persentase Capaian Kinerja Aparatur		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	3.271.424,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase serapan tenaga kerja sektor ekonomi unggulan		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	322.146.995,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	66.852.650,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan DPMPSTSP Kota Mataram		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	631.148.250,00
			Persentase kepuasan pelayanan SKPD		
				DINAS PERTANIAN	59.155.084,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			persentase penyerapan APBD		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	470.270.920,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Capaian Kenaikan Realisasi PAD dibanding tahun sebelumnya		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				BADAN KEUANGAN DAERAH	8.844.490.570,00
			Kemandirian Keuangan Daerah		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	8.844.490.570,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Rasio kepemilikan rumah		
				UPTD Rusunawa	1.012.216.799,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Rasio fatalitas per 10.000 kendaraan		
				UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	272.300.000,00
			Rasio konektivitas kota		
				UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	272.300.000,00
			Rasio Waktu Tempuh		
				UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	272.300.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Infrastruktur Wilayah		
				UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	84.591.790,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan		
				UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	84.591.790,00
			Indeks Infrastruktur Wilayah		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Pengelola Perparkiran	98.107.963,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan		
				UPTD Pengelola Perparkiran	98.107.963,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Mayura	112.600,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Mayura	56.300,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Mayura	56.300,00
<b>5</b>	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</b>				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.765.555.710,00
			Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Sesuai Standar		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.765.555.710,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase saluran drainase dalam kondisi baik		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.384.200.498,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Kelurahan Tangguh Bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	511.414.978,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan BPBD		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.957.767.621,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan dan Jaminan Sosial		
				DINAS SOSIAL	221.571.500,00
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan dan Jaminan Sosial		
				DINAS SOSIAL	80.026.959,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	71.499.800,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pengurangan luas kawasan tercemar		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	205.649.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase luas RTH publik		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.289.041.100,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah B3 yang disimpan sementara		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	47.254.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase jumlah usaha da/ atau kegiatan yang taat terhadap dokumen persetujuan lingkungan		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	92.828.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Presentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	90.900.000,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Sesuai SOP		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	530.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Penanganan Sampah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27.838.710.335,00
			Persentase Pengurangan Sampah		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27.838.710.335,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.371.480.040,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pengurangan luas kawasan tercemar		
				UPTD Laboratorium Lingkungan	3.377.088.207,00
<b>6</b>	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	271.540.774,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indeks Kemudahan Ijin Berusaha		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	798.467.174,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			persentase program kerja DPRD terfasilitasi		
				SEKRETARIAT DPRD	21.276.728.445,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD		
				SEKRETARIAT DPRD	6.197.127.082,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase OPD dengan Katagori SAKIP Sangat Baik		
				INSPEKTORAT DAERAH	1.932.530.302,00
			Persentase penjaminan atas kualitas dokumen LPPD telah sesuai ketentuan		
				INSPEKTORAT DAERAH	966.265.151,00
			Persentase Penjaminan Kualitas atas dokumen rancangan akhir RKPD dan RKPD Perubahan telah sesuai ketentuan		
				INSPEKTORAT DAERAH	966.265.151,00
			Persentase Penjaminan Kualitas atas dokumen rancangan akhir RPJMD sesuai ketentuan		
				INSPEKTORAT DAERAH	966.265.151,00
			Persentase penjaminan kualitas atas dokumen rancangan KUAPPAS dan KUPA-PPAS perubahan telah sesuai ketentuan		
				INSPEKTORAT DAERAH	966.265.151,00
			Persentase penjaminan kualitas atas dokumen RKA dan RKPA PD telah sesuai ketentuan		
				INSPEKTORAT DAERAH	966.265.151,00
			Persentase rekomendasi temuan eksternal Yang terselesaikan		
				INSPEKTORAT DAERAH	966.265.151,00
			Persentase rekomendasi temuan internal yang terselesaikan		
				INSPEKTORAT DAERAH	966.265.151,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase tindak lanjut atas jumlah rekomendasi temuan dan nilai pengembalian keuangan pemeriksaan eksternal		
				INSPEKTORAT DAERAH	966.265.151,00
			Persentase tindak lanjut atas jumlah rekomendasi temuan dan nilai pengembalian keuangan pemeriksaan internal		
				INSPEKTORAT DAERAH	966.265.151,00
			Persentase tindak lanjut evaluasi SAKIP Kota dan OPD		
				INSPEKTORAT DAERAH	966.265.151,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Inspektorat		
				INSPEKTORAT DAERAH	614.109.313,00
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpenuhi		
				INSPEKTORAT DAERAH	278.750.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase ketepatan waktu perencanaan (P2)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.494.699.492,00
			Persentase ketercapaian target tujuan dan sasaran daerah (P5)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.273.236.478,00
			Persentase ketersediaan data perencanaan (P1)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.192.758.769,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat kota (P3.1)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.494.699.492,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			persentase kesesuaian APBD dengan RKPD		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	1.869.830.820,00
			Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	164.024.000,00
			Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	967.396.380,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			nilai solvabilitas layanan		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	8.161.786.830,00
			Persentase laporan BMD tahunan OPD tepat waktu		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	8.161.786.830,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	40.014.251.639,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN CAKRANEGARA	203.199.828,00
			IKM Kelurahan		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	199.199.828,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	199.199.828,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	1.543.486.182,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	1.543.486.182,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	1.543.486.182,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penyelesaian Permasalahan Tantribumlinmas di kecamatan		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	367.846.778,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	9.441.652.889,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			IKM Kecamatan		
				KECAMATAN SANDUBAYA	195.352.500,00
			IKM Kelurahan		
				KECAMATAN SANDUBAYA	195.352.500,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				KECAMATAN SANDUBAYA	449.393.500,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				KECAMATAN SANDUBAYA	485.233.500,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				KECAMATAN SANDUBAYA	467.313.500,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				KECAMATAN SANDUBAYA	467.313.500,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase penyelesaian permasalahan tribunlinmas di kecamatan		
				KECAMATAN SANDUBAYA	206.865.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				KECAMATAN SANDUBAYA	7.183.999.069,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				KECAMATAN AMPENAN	78.852.196,00
			IKM Kelurahan		
				KECAMATAN AMPENAN	78.852.196,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				KECAMATAN AMPENAN	1.453.454.894,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				KECAMATAN AMPENAN	1.453.454.894,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan.		
				KECAMATAN AMPENAN	298.578.740,00
			Persentase Permasalahan Bidang Trantib yang terselesaikan		
				KECAMATAN AMPENAN	298.578.740,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				KECAMATAN AMPENAN	361.826.481,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Dasan Cermen	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Dasan Cermen	3.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Dasan Cermen	522.823.030,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Dasan Cermen	522.823.030,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Dasan Cermen	159.129.544,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Abian Tubuh Baru	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Abian Tubuh Baru	3.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Abian Tubuh Baru	687.682.160,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Abian Tubuh Baru	687.682.160,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Abian Tubuh Baru	161.559.028,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Babakan	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Babakan	3.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Babakan	140.339.742,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Turida	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Turida	3.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Turida	600.053.792,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Turida	600.053.792,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Turida	147.731.428,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Mandalika	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Mandalika	3.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Mandalika	697.785.784,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Mandalika	<b>697.785.784,00</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Mandalika	161.714.581,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Bertais	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Bertais	3.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Bertais	581.296.859,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Bertais	581.296.859,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Bertais	170.331.020,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Selagalas	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Selagalas	3.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Selagalas	662.455.640,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Selagalas	662.455.640,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Selagalas	166.358.116,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Ampenan Selatan	7.504.915,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Ampenan Selatan	524.643.308,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Ampenan Selatan	524.643.308,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Ampenan Selatan	73.018.748,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Dayan Peken	7.001.022,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Dayan Peken	551.941.538,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Dayan Peken	551.941.538,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Dayan Peken	55.150.580,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Banjar	367.877.816,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Banjar	367.877.816,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan		
				Kelurahan Banjar	8.760.000,00
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Banjar	35.126.732,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pejeruk	10.673.256,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Pejeruk	607.150.854,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Pejeruk	607.150.854,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Pejeruk	51.266.336,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pejarakan Karya	7.070.975,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Pejarakan Karya	431.744.276,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Pejarakan Karya	431.744.276,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Pejarakan Karya	86.778.531,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Taman Sari	6.074.784,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Taman Sari	513.464.172,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Taman Sari	513.464.172,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Taman Sari	94.932.413,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Ampenan Tengah	8.379.784,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Ampenan Tengah	786.256.068,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Ampenan Tengah	786.256.068,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Ampenan Tengah	89.945.446,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Kebun Sari	8.856.950,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Kebun Sari	495.905.612,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Kebun Sari	495.905.612,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Kebun Sari	48.607.733,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Ampenan Utara	8.829.340,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Ampenan Utara	397.080.158,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Ampenan Utara	397.080.158,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Ampenan Utara	81.437.908,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Bintaro	8.376.222,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Bintaro	55.248.321,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Cakranegara Timur	200.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Cakranegara Timur	200.000,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Cakranegara Timur	200.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Timur	531.248.292,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Timur	531.248.292,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Cakranegara Timur	531.248.292,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Cakranegara Timur	138.111.818,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Sayang-Sayang	600.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Sayang-Sayang	600.000,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Sayang-Sayang	600.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Sayang-Sayang	676.133.760,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Sayang-Sayang	676.133.760,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Sayang-Sayang	676.133.760,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Sayang-Sayang	143.882.941,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Karang Taliwang	29.188,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Karang Taliwang	29.188,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Karang Taliwang	29.188,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Karang Taliwang	476.970.556,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Karang Taliwang	476.970.556,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Karang Taliwang	476.970.556,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Karang Taliwang	94.118.887,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Cakranegara Utara	770.348,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Cakranegara Utara	770.348,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Cakranegara Utara	770.348,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Utara	511.464.314,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Utara	511.464.314,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Cakranegara Utara	511.464.314,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Cakranegara Utara	88.155.363,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Cilinaya	789.727.930,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
				Kelurahan Cilinaya	789.727.930,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Cilinaya	789.727.930,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Cilinaya	82.985.704,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	135.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	135.000,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	135.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	621.594.287,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	621.594.287,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	621.594.287,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	131.126.919,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Sapta Marga	112.600,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Sapta Marga	112.600,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Sapta Marga	112.600,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Sapta Marga	83.190.256,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Sapta Marga	83.190.256,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Sapta Marga	83.190.256,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Sapta Marga	76.602.896,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Mayura	82.970.604,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Mayura	82.970.604,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Mayura	82.970.604,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Mayura	72.892.893,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	132.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	132.000,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	132.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	111.750.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	111.750.000,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	111.750.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	71.890.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Cakranegara Barat	50.380,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Cakranegara Barat	50.380,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Cakranegara Barat	50.380,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Barat	720.360.080,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Barat	720.360.080,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Cakranegara Barat	720.360.080,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Cakranegara Barat	88.077.650,00

## 2. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MATARAM DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 merupakan tahun ke 1 (satu) dari pelaksanaan periodisasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 yang fokus pada terwujudnya kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa, kualitas lingkungan yang lestari dan asri serta kesejahteraan masyarakat yang mandiri.

Tujuan RPD Provinsi memiliki ultimate goal RPD, Tujuan Utama maupun tujuan pendukung yaitu :

Ultimate Goal RPD yaitu “ **PENINGKATAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI DAN DIVERSIFIKASI EKONOMI YANG INKLUSIF UNTUK MEWUJUDKAN KEGEMILANGAN NTB YANG BERKELANJUTAN.**”

Dengan Tujuan Utama sebagai berikut :

- 1). Terwujudnya Peningkatan Pembangunan Manusia;
- 2). Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Asri;
- 3). Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri.

Sedang Tujuan Pendukung yaitu :

- 1). Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- 2) Terwujudnya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's);
- 3). Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah.

Prioritas pembangunan tahun 2024 Provinsi NTB disusun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Provinsi NTB yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, dimana tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 yang diarahkan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; perluasan akses dan kesempatan serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Peningkatan ekonomi dan infrastruktur dilakukan melalui peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kewirausahaan dan kesempatan kerja, kemudahan pelayanan

perizinan, dan pengembangan industri. Sementara peningkatan integritas aparatur diimplementasikan melalui upaya-upaya untuk meningkatkan integrasi aparatur disertai dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Perwujudan NTB Lestari diupayakan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan kawasan permukiman, dan upaya penyediaan ruang terbuka hijau bagi warga. Selanjutnya, upaya mewujudkan NTB yang ramah ditandai dengan pengembangan pariwisata dan kebudayaan serta pengembangan wilayah pesisir dan perdesaan.

Secara rinci, Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD 2024 yaitu :

1. Misi 1 Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah, dengan program prioritas meliputi :
  - a. Mitigasi bencana.
  - b. Infrastruktur dasar.
  - c. Infrastruktur kawasan.
  - d. Konektivitas wilayah.
  - e. Teknologi informasi dan komunikasi
2. Misi 2 Transformasi birokrasi dengan program prioritas meliputi :
  - a. Integritas dan kinerja tinggi.
  - b. Bersih dari KKN dan Berdedikasi.
3. Misi 3 Peningkatan SDM dengan program prioritas meliputi :
  - a. Peningkatan kualitas SDM.
4. Misi 4 Pengelolaan Sumber Daya alam dan Lingkungan yang berkelanjutan.
5. Misi 5 Penanggulangan kemiskinan mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. Misi 6 Perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Sedangkan program unggulannya antara lain :

1. Desa Tangguh Bencana, Sekolah Siaga Bencana, Si-AGA, Rumah Layak Huni, Air Bersih untuk Semua, SPAM regional, Jamban Keluarga, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, dan Nusa Terang Benderang.
2. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik , dengan program prioritas meliputi :
  - a. Peningkatan Keandalan Perencanaan

- b. Optimalisasi Pendapatan daerah
- c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Sedangkan program unggulannya antara lain:

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pemerataan Pendidikan
- b. Akses Pelayanan Kesehatan
- c. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
- d. Perlindungan Sosial

Sedangkan program unggulannya antara lain: Ayo Bercita-cita, 1000 Mahasiswa Luar Negeri, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitalisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, dan NTB juara.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- c. Peningkatan Daya Dukung SDA
- d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain: Tataruang Berkelanjutan, NTB Zero Waste, NTB hijau, Cagar Biosfer, Energi Baru Terbarukan, Pertanian Lestari, Desa Mandiri Pangan, Rinjani Tambora Global Geopark, Bank Sampah, Taman Asri.

5. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pengentasan Kemiskinan
- b. Peningkatan investor sektor riil
- c. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
- d. Pengembangan Pariwisata
- e. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- f. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sedangkan program unggulannya antara lain: Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Desa, STIP Inovatif, Industrialisasi Produk Pertanian, Rumah Kemasan,

Koperasi Aktif, BUMDes Maju, UMKM Bersaing, NTB Ramah Investasi, Kampung Unggas, HHBK Unggul, 99 Desa Wisata, Apartemen Ikan.

6. Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dengan program prioritas meliputi :
  - a. Peningkatan Nilai Sosial Budaya dan Toleransi masyarakat.
  - b. Peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah
  - c. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat
  - d. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Sedangkan program unggulannya antara lain: IC pusat peradaban, Bale Mediasi, Kampung Madani, Sekolah Perjumpaan, Kota Layak Anak.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dengan Prioritas Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat dapat disampaikan dalam tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel. 3.2**  
**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang (PD-1)</b>				
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase Koperasi Cukup Sehat		
				DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	194.935.475,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase SDM Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas		
				DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	410.234.525,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Usaha mikro yang naik kelas		
				DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase pertumbuhan omzet per UMKM		
				DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.077.511.950,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri		
				DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	32.359.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM		
				DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi baik		
				DINAS PERTANIAN	24.260.046,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH		
				DINAS PERTANIAN	101.988.810,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase bencana pertanian yang dikendalikan		
				DINAS PERTANIAN	8.087.021,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Kelompok Tani Mandiri		
				DINAS PERTANIAN	150.000.000,00
<b>2</b>	<b>Pembangunan Manusia (PD-2)</b>				
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar		
				DINAS KESEHATAN	48.702.109,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase capaian rumah tangga sehat		
				DINAS KESEHATAN	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks kepuasan pelayanan dinas kesehatan kota mataram		
				DINAS KESEHATAN	56.186.297.618,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Age Specific Fertility Rate (ASFR)		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/m. CPR)		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00
			Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase Keluarga Pra Sejahtera		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan DPPKB Kota Mataram		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pemuda yang Aktif didalam Organisasi Kepemudaan		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Organisasi Kepramukaan		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			IKM PERPUSTAKAAN		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00
			TINGKAT KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN PER HARI		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase potensi kasus pelanggaran ideologi pancasila yang dapat dicegah		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	42.320.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase potensi konflik politik yang dapat dicegah		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	19.609.733.438,00
			Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/pemilukada		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	19.609.733.438,00
			Tingkat pemahaman masyarakat dalam proses demokrasi		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	19.609.733.438,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase ormas yang aktif dan taat pada peraturan perundang-undangan		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	41.399.729,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase potensi konflik antar umat beragama yang dapat dicegah		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	302.630.545,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase konflik sosial yang tertangani		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1.068.373.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Bakesbangpol		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1.500.000,00
<b>3</b>	<b>Pembangunan Lingkungan (PD-3)</b>				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	247.927.280,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Sesuai Standar		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	247.927.280,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase akses air minum yang layak dan aman		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.393.578,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase rumah tangga dengan pengelolaan air limbah domestik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase saluran drainase dalam kondisi baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	392.488.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			persentase luas peruntukan lahan existing yang sesuai dengan RTRW		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	69.377.936,00
			Persentase Pemanfaatan Pola Ruang Yang Sesuai RTR		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118.747.273,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Rasio kepemilikan rumah		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	44.670.466,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Luas Kawasan Kumuh		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Persentase Penanganan kawasan tidak kumuh		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	700.525.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	39.798.988.770,00
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Tingkat tertib administrasi pertanahan		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52.999.791,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas PKP		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00
			Indeks kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	47.409.252,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD		
				DINAS PERIKANAN	2.798.980,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Rasio kepemilikan rumah		
				UPTD Rusunawa	1.012.216.799,00
<b>4</b>	<b>Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)</b>				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Fasyankes yang terakreditasi		
				DINAS KESEHATAN	2.842.257.100,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar		
				DINAS KESEHATAN	45.695.000,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes yang memiliki ijin		
				DINAS KESEHATAN	6.554.960,00
			Persentase TPM yang memiliki Izin		
				DINAS KESEHATAN	6.554.960,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	196.974.119,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum kota yang tertangani		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Satpol PP		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.582.308,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial		
				DINAS SOSIAL	0,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS yang dapat berfungsi sosial secara wajar		
				DINAS SOSIAL	3.344.634,00
			Persentase PMKS yang dapat berfungsi sosial secara wajar		
				DINAS SOSIAL	0,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase PMKS yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial		
				DINAS SOSIAL	15.600.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan dan Jaminan Sosial		
				DINAS SOSIAL	0,00
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan dan Jaminan Sosial		
				DINAS SOSIAL	80.026.959,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Sosial Kota Mataram		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS SOSIAL	0,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi		
				DINAS TENAGA KERJA	999.999.850,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang dipenuhi oleh perusahaan		
				DINAS TENAGA KERJA	27.650.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH Konsumsi)		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase Daerah Rawan Pangan Yang Tertangani		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00
			Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	81.240.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diawasi Keamanannya		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	32.882.214,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	7.687.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Pertumbuhan nilai tambah perikanan tangkap		
				DINAS PERIKANAN	98.324.220,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya		
				DINAS PERIKANAN	236.351.420,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Pertumbuhan Nilai tambah hasil perikanan yang diolah / dipasarkan		
				DINAS PERIKANAN	124.742.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD		
				DINAS PERIKANAN	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			persentase sarana pertanian yang disediakan		
				DINAS PERTANIAN	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi baik		
				DINAS PERTANIAN	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH		
				DINAS PERTANIAN	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase bencana pertanian yang dikendalikan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERTANIAN	16.172.943,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Kelompok Tani Mandiri		
				DINAS PERTANIAN	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kepuasan pelayanan SKPD		
				DINAS PERTANIAN	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Indeks kepuasan pelayanan Instalasi Famasi Kesehatan		
				UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	722.421.097,00
			Indeks kepuasan pelayanan Laboratorium Kesehatan		
				UPTD Laboratorium Kesehatan	4.721.941.739,00
<b>5</b>	<b>Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5)</b>				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase ketercapaian implementasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan		
				DINAS PENDIDIKAN	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulum		
				DINAS PENDIDIKAN	159.999.708,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan		
				DINAS PENDIDIKAN	538.728.294,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
			Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi standar pendidikan		
				DINAS PENDIDIKAN	159.999.839,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase obyek pemajuan budaya yang dikembangkan		
				DINAS PENDIDIKAN	238.236.373,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Mataram		
				DINAS PENDIDIKAN	0,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pendidikan		
				DINAS PENDIDIKAN	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			IKM Puskesmas		
				DINAS KESEHATAN	16.594.500,00
			IKM RSUD Kota Mataram		
				DINAS KESEHATAN	16.594.500,00
			Persentase Fasyankes dengan status akreditasi utama		
				DINAS KESEHATAN	0,00
			Persentase Fasyankes yang terakreditasi		
				DINAS KESEHATAN	16.594.500,00
			Persentase ketercapain implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan		
				DINAS KESEHATAN	16.594.500,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
				DINAS KESEHATAN	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan dinas kesehatan kota mataram		
				DINAS KESEHATAN	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi Rumah Sakit		
				RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	165.517.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan RSUD Kota Mataram		
				RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	4.809.464.730,00
			Indeks kepuasan pelayanan SKPD		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.250.650,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan BPBD		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang dipenuhi oleh perusahaan		
				DINAS TENAGA KERJA	38.190.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja		
				DINAS TENAGA KERJA	3.749.900,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan		
				DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pengurangan luas kawasan tercemar		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase luas RTH publik		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.216.241.100,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah B3 yang disimpan sementara		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	47.254.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase jumlah usaha da/ atau kegiatan yang taat terhadap dokumen persetujuan lingkungan		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	92.828.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	90.900.000,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Sesuai SOP		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	48.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Penanganan Sampah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	52.500.000,00
			Persentase Pengurangan Sampah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	52.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62.164.843,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Cakupan kepemilikan akta kelahiran		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.165.000,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Cakupan kepemilikan KTP-el		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	36.509.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Nilai kepuasan layanan pemanfaatan data kependudukan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.102.000,00
			Tingkat akurasi/keabsahan data dokumen administrasi kependudukan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.102.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Disdukcapil Kota Mataram		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Rasio fatalitas per 10.000 kendaraan		
				DINAS PERHUBUNGAN	19.786.824,00
			Rasio konektivitas kota		
				DINAS PERHUBUNGAN	19.786.824,00
			Rasio Waktu Tempuh		
				DINAS PERHUBUNGAN	19.786.824,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Infrastruktur Wilayah		
				DINAS PERHUBUNGAN	0,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan		
				DINAS PERHUBUNGAN	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Nilai aspek layanan publik berbasis elektronik		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Nilai Aspek 6 Audit TIK		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.350.000,00
			Nilai Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.350.000,00
			Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.350.000,00
			Nilai Aspek Penyelenggara SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.350.000,00
			Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.350.000,00
			Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.350.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	51.134.490,00
			Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	51.134.490,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Nilai aspek audit TIK		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.798.682,00
			Nilai aspek kebijakan internal terkait tata Kelola SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.798.682,00
			Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.798.682,00
			Nilai aspek penyelenggaraan SPBE		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.798.682,00
			Nilai Aspek Penyelenggaraan SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.798.682,00
			Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.798.682,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan Perangkat Daerah		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.847.460,00
			Persentase Capaian Kinerja Aparatur		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	6.195.749,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	3.271.424,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indeks Kemudahan Ijin Berusaha		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	210.999.254,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase serapan tenaga kerja sektor ekonomi unggulan		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	9.147.123,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	66.852.650,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan DPMPSTSP Kota Mataram		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	2.250.000,00
			Nilai SAKIP		
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Jumlah pengguna Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	27.519.789,00
			"Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis dan Pengelolaan Arsip Dinamis		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	55.017.985,00
			Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis dan Pengelolaan Arsip Dinamis.		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.497.884,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah		
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00
			Persentase kepuasan pelayanan SKPD		
				DINAS PERTANIAN	8.400.000,00
			Indeks Kepuasan pelayanan dinas perdagangan kota mataram		
				DINAS PERDAGANGAN	5.580.228,00
			Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%		
				SEKRETARIAT DAERAH	170.702.706,00
			Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik		
				SEKRETARIAT DAERAH	170.702.706,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			persentase program kerja DPRD terfasilitasi		
				SEKRETARIAT DPRD	7.777.844,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD		
				SEKRETARIAT DPRD	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase OPD dengan Katagori SAKIP Sangat Baik		
				INSPEKTORAT DAERAH	75.228.560,00
			Persentase penjaminan atas kualitas dokumen LPPD telah sesuai ketentuan		
				INSPEKTORAT DAERAH	75.228.560,00
			Persentase Penjaminan Kualitas atas dokumen rancangan akhir RKPD dan RKPD Perubahan telah sesuai ketentuan		
				INSPEKTORAT DAERAH	75.228.560,00
			Persentase Penjaminan Kualitas atas dokumen rancangan akhir RPJMD sesuai ketentuan		
				INSPEKTORAT DAERAH	75.228.560,00
			Persentase penjaminan kualitas atas dokumen rancangan KUAPPAS dan KUPA-PPAS perubahan telah sesuai ketentuan		
				INSPEKTORAT DAERAH	75.228.560,00
			Persentase penjaminan kualitas atas dokumen RKA dan RKPA PD telah sesuai ketentuan		
				INSPEKTORAT DAERAH	75.228.560,00
			Persentase rekomendasi temuan eksternal Yang terselesaikan		
				INSPEKTORAT DAERAH	75.228.560,00
			Persentase rekomendasi temuan internal yang terselesaikan		
				INSPEKTORAT DAERAH	75.228.560,00
			'Persentase tindak lanjut atas jumlah rekomendasi temuan dan nilai pengembalian keuangan pemeriksaan eksternal		
				INSPEKTORAT DAERAH	75.228.560,00
			Persentase tindak lanjut atas jumlah rekomendasi temuan dan nilai pengembalian keuangan pemeriksaan internal		
				INSPEKTORAT DAERAH	75.228.560,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase tindak lanjut evaluasi SAKIP Kota dan OPD		
				INSPEKTORAT DAERAH	75.228.560,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Inspektorat		
				INSPEKTORAT DAERAH	0,00
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpenuhi		
				INSPEKTORAT DAERAH	7.000.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase ketepatan waktu perencanaan (P2)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00
			Persentase ketercapaian target tujuan dan sasaran daerah (P5)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00
			Persentase ketersediaan data perencanaan (P1)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00
			Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat kota (P3.1)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase kesesuaian kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD (Renstra dan Renja)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.048,00
			Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat OPD (P3.2)		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.048,00
			Persentase urusan pemerintahan yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.048,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Bappeda		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.096.140,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			persentase kesesuaian APBD dengan RKPD		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	5.750.000,00
			Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	164.024.000,00
			Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	0,00
			persentase penyerapan APBD		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	88.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			nilai solvabilitas layanan		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	0,00
			Persentase laporan BMD tahunan OPD tepat waktu		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Capaian Kenaikan Realisasi PAD dibanding tahun sebelumnya		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	4.419.208.650,00
			Kemandirian Keuangan Daerah		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	4.419.208.650,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	2.025.000,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Nilai Disiplin ASN		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.847.987,00
			Nilai Kinerja ASN		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.256.035,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Nilai Kompetensi ASN		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.412.113,00
			Nilai Kualifikasi ASN		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.548.054,00
			persentase penyelesaian pengajuan data kepegawaian/ administrasi kepegawaian tepat waktu		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.548.054,00
			persentase penyelesaian pengajuan data kepegawaian/administrasi kepegawaian tepat waktu		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.256.035,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan BKPSDM Kota Mataram		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.700.000,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase inovasi yang memenuhi satuan indikator inovasi daerah Kota Mataram		
				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.750.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Rekomendasi Majelis Kelitbangan terhadap produk kajian yang ditindaklanjuti		
				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15.629.352,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan OPD		
				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	56.300,00
			IKM Kelurahan		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	56.300,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	56.300,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	2.050.000,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	2.050.000,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	2.050.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penyelesaian Permasalahan Tantribumlinmas di kecamatan		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	76.081.778,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				KECAMATAN CAKRANEGARA	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				KECAMATAN SANDUBAYA	2.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				KECAMATAN SANDUBAYA	2.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				KECAMATAN SANDUBAYA	38.497.500,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				KECAMATAN SANDUBAYA	17.920.000,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				KECAMATAN SANDUBAYA	17.920.000,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN SANDUBAYA	17.920.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase penyelesaian permasalahan tribunlinmas di kecamatan		
				KECAMATAN SANDUBAYA	79.240.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				KECAMATAN SANDUBAYA	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				KECAMATAN MATARAM	5.479.676,00
			IKM Kelurahan		
				KECAMATAN MATARAM	5.479.676,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				KECAMATAN MATARAM	0,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				KECAMATAN MATARAM	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan		
				KECAMATAN MATARAM	100.950.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase penyelesaian permasalahan tratribunlinmas di kecamatan		
				KECAMATAN MATARAM	100.950.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				KECAMATAN MATARAM	4.920.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				KECAMATAN SELAPARANG	300.999.900,00
			IKM Kecamatan		
				KECAMATAN SELAPARANG	22.481.300,00
			IKM Kelurahan		
				KECAMATAN SELAPARANG	22.481.300,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				KECAMATAN SELAPARANG	6.499.900,00
			Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				KECAMATAN SELAPARANG	18.838.967,00
			Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				KECAMATAN SELAPARANG	6.499.900,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN SELAPARANG	18.838.967,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan		
				KECAMATAN SELAPARANG	99.099.900,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		
				KECAMATAN SELAPARANG	99.099.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Kecamatan		
				KECAMATAN SELAPARANG	0,00
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				KECAMATAN SELAPARANG	1.800.000,00
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				KECAMATAN SELAPARANG	29.388.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				KECAMATAN AMPENAN	3.713.900,00
			IKM Kelurahan		
				KECAMATAN AMPENAN	3.713.900,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN AMPENAN	77.992.546,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				KECAMATAN AMPENAN	77.992.546,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan.		
				KECAMATAN AMPENAN	136.481.044,00
			Persentase Permasalahan Bidang Trantib yang terselesaikan		
				KECAMATAN AMPENAN	136.481.044,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				KECAMATAN AMPENAN	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				KECAMATAN SEKARBELA	0,00
			IKM Kelurahan		
				KECAMATAN SEKARBELA	0,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				KECAMATAN SEKARBELA	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN SEKARBELA	0,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada kategori lanjut		
				KECAMATAN SEKARBELA	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan		
				KECAMATAN SEKARBELA	123.170.488,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela		
				KECAMATAN SEKARBELA	2.583.328,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Perencanaan		
				Bagian Administrasi Pembangunan	201.430.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%		
				Bagian Administrasi Pembangunan	1.000.000,00
			Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik		
				Bagian Administrasi Pembangunan	1.000.000,00
			Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlaksana		
				Bagian Administrasi Pembangunan	2.000.000,00
			Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlaksanan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Bagian Administrasi Pembangunan	10.644.840,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Kematangan UKPBJ		
				Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	409.585.811,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%		
				Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00
			Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik		
				Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Nilai LPPD		
				Bagian Pemerintahan	25.333.871,00
			Persentase rata-rata Capaian SPM		
				Bagian Pemerintahan	25.333.871,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%		
				Bagian Pemerintahan	6.660.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik		
				Bagian Pemerintahan	6.660.000,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Nilai LPPD		
				Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.564.539.876,00
			Persentase rata-rata Capaian SPM		
				Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.564.539.876,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%		
				Bagian Kesejahteraan Rakyat	6.500.000,00
			Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik		
				Bagian Kesejahteraan Rakyat	6.500.000,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Nilai LPPD		
				Bagian Hukum	147.780.000,00
			Persentase rata-rata Capaian SPM		
				Bagian Hukum	147.780.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%		
				Bagian Hukum	400.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik		
				Bagian Hukum	400.000,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase BUMD dengan tingkat kesehatan berkategori AA		
				Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2.627.212,00
			Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Tinggi		
				Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	41.205.995,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%		
				Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9.689.784,00
			Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik		
				Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9.689.784,00
			Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%		
				Bagian Organisasi	1.000.000,00
			Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik		
				Bagian Organisasi	1.000.000,00
			Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%		
				Bagian Umum	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik		
				Bagian Umum	0,00
			Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%		
				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9.750.000,00
			Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik		
				Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9.750.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Rasio fatalitas per 10.000 kendaraan		
				UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	28.183.218,00
			Rasio konektivitas kota		
				UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	28.183.218,00
			Rasio Waktu Tempuh		
				UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	28.183.218,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Infrastruktur Wilayah		
				UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	27.995.790,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan		
				UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	27.995.790,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Dasan Cermen	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Dasan Cermen	3.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Dasan Cermen	14.078.750,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Dasan Cermen	14.078.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Dasan Cermen	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Abian Tubuh Baru	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Abian Tubuh Baru	3.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Abian Tubuh Baru	15.775.000,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Abian Tubuh Baru	15.775.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Abian Tubuh Baru	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Babakan	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Babakan	3.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Babakan	17.575.000,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Babakan	17.575.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Babakan	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Turida	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Turida	3.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Turida	14.740.000,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Turida	14.740.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Turida	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Mandalika	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Mandalika	3.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Mandalika	7.296.540,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Mandalika	7.296.540,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Mandalika	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Bertais	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Bertais	3.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Bertais	22.915.000,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Bertais	22.915.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Bertais	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Selagalas	3.000.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Selagalas	3.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Selagalas	14.200.000,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Selagalas	14.200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya		
				Kelurahan Selagalas	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pengurangan luas kawasan tercemar		
				UPTD Laboratorium Lingkungan	3.377.088.207,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Ampenan Selatan	7.504.915,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Ampenan Selatan	8.492.480,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Ampenan Selatan	8.492.480,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Ampenan Selatan	1.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Rasio fatalitas per 10.000 kendaraan		
				UPTD Pengelola Perparkiran	701.065.318,00
			Rasio konektivitas kota		
				UPTD Pengelola Perparkiran	701.065.318,00
			Rasio Waktu Tempuh		
				UPTD Pengelola Perparkiran	701.065.318,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Infrastruktur Wilayah		
				UPTD Pengelola Perparkiran	0,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan		
				UPTD Pengelola Perparkiran	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Dayan Peken	7.001.022,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Dayan Peken	11.273.538,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Dayan Peken	11.273.538,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Dayan Peken	500.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Banjar	9.926.350,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Banjar	9.992.890,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Banjar	9.992.890,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan		
				Kelurahan Banjar	1.800.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Banjar	500.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pejeruk	10.673.256,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Pejeruk	9.981.094,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Pejeruk	9.981.094,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Pejeruk	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pejarakan Karya	7.070.975,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Pejarakan Karya	10.180.750,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Pejarakan Karya	10.180.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Pejarakan Karya	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Taman Sari	6.074.784,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Taman Sari	7.537.284,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Taman Sari	7.537.284,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Taman Sari	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Ampenan Tengah	8.379.784,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Ampenan Tengah	10.730.127,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Ampenan Tengah	10.730.127,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Ampenan Tengah	500.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Kebun Sari	8.856.950,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Kebun Sari	8.599.550,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Kebun Sari	8.599.550,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Kebun Sari	500.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Ampenan Utara	8.829.340,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Ampenan Utara	9.901.390,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Ampenan Utara	9.901.390,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Ampenan Utara	500.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Bintaro	8.376.222,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Bintaro	10.264.406,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Bintaro	10.264.406,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kelurahan Bintaro	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Jempong Baru	14.545.840,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada kategori lanjut		
				Kelurahan Jempong Baru	14.545.840,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela		
				Kelurahan Jempong Baru	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Kekalik Jaya	9.846.388,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada kategori lanjut		
				Kelurahan Kekalik Jaya	9.846.388,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela		
				Kelurahan Kekalik Jaya	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Tanjung Karang Permai	9.751.690,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada kategori lanjut		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Tanjung Karang Permai	9.751.690,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela		
				Kelurahan Tanjung Karang Permai	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Karang Pule	10.915.444,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada kategori lanjut		
				Kelurahan Karang Pule	10.915.444,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela		
				Kelurahan Karang Pule	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Tanjung Karang	8.762.171,00
			Persentase kelurahan berpredikat swasembada kategori lanjut		
				Kelurahan Tanjung Karang	8.762.171,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela		
				Kelurahan Tanjung Karang	671.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Mataram Barat	6.450.000,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Mataram Barat	6.450.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Mataram Barat	1.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Monjok Timur	6.374.000,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Monjok Timur	6.374.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan.		
				Kelurahan Monjok Timur	0,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		
				Kelurahan Monjok Timur	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Monjok Timur	920.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Dasan Agung	9.150.000,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Dasan Agung	9.150.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan.		
				Kelurahan Dasan Agung	0,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		
				Kelurahan Dasan Agung	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Dasan Agung	1.800.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Dasan Agung Baru	6.450.000,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Dasan Agung Baru	6.450.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan.		
				Kelurahan Dasan Agung Baru	0,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		
				Kelurahan Dasan Agung Baru	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Dasan Agung Baru	1.800.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Karang Baru	6.150.500,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Karang Baru	6.150.500,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan.		
				Kelurahan Karang Baru	0,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		
				Kelurahan Karang Baru	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Karang Baru	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Monjok	6.399.900,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Monjok	6.399.900,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan.		
				Kelurahan Monjok	0,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		
				Kelurahan Monjok	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Monjok	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Gomong	6.349.500,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Gomong	6.349.500,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Gomong	0,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		
				Kelurahan Gomong	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Gomong	1.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Monjok Barat	5.400.000,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Monjok Barat	5.400.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan.		
				Kelurahan Monjok Barat	0,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		
				Kelurahan Monjok Barat	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Monjok Barat	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Rembiga	6.450.000,00
			persentase kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Rembiga	6.450.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase konflik sosial yang terselesaikan.		
				Kelurahan Rembiga	0,00
			Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Rembiga	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			NILAI SAKIP KECAMATAN		
				Kelurahan Rembiga	1.475.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Pagutan Barat	1.092.494,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pagutan Barat	1.092.494,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pagutan Barat	13.805.150,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pagutan Barat	13.805.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pagutan Barat	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Punia	730.506,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Punia	730.506,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Punia	9.975.000,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Punia	9.975.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Punia	1.200.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Pagutan	2.520.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pagutan	2.520.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pagutan	15.571.350,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pagutan	15.571.350,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pagutan	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Pagesangan Barat	1.800.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pagesangan Barat	1.800.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pagesangan Barat	7.192.810,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pagesangan Barat	7.192.810,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pagesangan Barat	549.745,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Pagutan Timur	1.416.040,00
			IKM Kelurahan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Pagutan Timur	1.416.040,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pagutan Timur	10.552.500,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pagutan Timur	10.552.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pagutan Timur	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Pagesangan Timur	1.133.528,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pagesangan Timur	1.133.528,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pagesangan Timur	12.756.950,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pagesangan Timur	12.756.950,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pagesangan Timur	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Mataram Timur	835.182,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Mataram Timur	835.182,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Mataram Timur	8.921.350,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Mataram Timur	8.921.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Mataram Timur	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Pagesangan	1.161.038,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pagesangan	1.161.038,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pagesangan	10.925.000,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
				Kelurahan Pagesangan	10.925.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pagesangan	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Pejanggik	1.300.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kelurahan berpredikat swasembada		
				Kelurahan Pejanggik	14.496.350,00
			persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Pejanggik	14.496.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram		
				Kelurahan Pejanggik	1.800.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Cakranegara Timur	200.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Cakranegara Timur	200.000,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Cakranegara Timur	200.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Timur	9.700.000,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Timur	9.700.000,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Cakranegara Timur	9.700.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Cakranegara Timur	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Sayang-Sayang	600.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Sayang-Sayang	600.000,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Sayang-Sayang	600.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Sayang-Sayang	14.364.270,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Sayang-Sayang	14.364.270,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Sayang-Sayang	14.364.270,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Sayang-Sayang	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Karang Taliwang	29.188,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Karang Taliwang	29.188,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Karang Taliwang	29.188,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Karang Taliwang	7.820.000,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Karang Taliwang	7.820.000,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Karang Taliwang	7.820.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Karang Taliwang	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Cakranegara Utara	770.348,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Cakranegara Utara	770.348,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Cakranegara Utara	770.348,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Utara	14.313.890,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Utara	14.313.890,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Cakranegara Utara	14.313.890,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Cakranegara Utara	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Cilinaya	27.600,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Cilinaya	27.600,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Cilinaya	27.600,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Cilinaya	18.434.170,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Cilinaya	18.434.170,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Cilinaya	18.434.170,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Cilinaya	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	135.000,00
			IKM Kelurahan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	135.000,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	135.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	12.286.815,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	12.286.815,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	12.286.815,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Cakranegara Selatan Baru	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Sapta Marga	112.600,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Sapta Marga	112.600,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Sapta Marga	112.600,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Sapta Marga	11.941.652,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kelurahan Sapta Marga	11.941.652,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Sapta Marga	11.941.652,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Sapta Marga	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Mayura	56.300,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Mayura	56.300,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Mayura	56.300,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Mayura	8.600.000,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Mayura	8.600.000,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Mayura	8.600.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Mayura	450.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	132.000,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	132.000,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	132.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	11.650.000,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	11.650.000,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	11.650.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Cakranegara Selatan	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			IKM Kecamatan		
				Kelurahan Cakranegara Barat	50.380,00
			IKM Kelurahan		
				Kelurahan Cakranegara Barat	50.380,00
			Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
				Kelurahan Cakranegara Barat	50.380,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase kelurahan berkategori berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Barat	15.235.000,00
			Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
				Kelurahan Cakranegara Barat	15.235.000,00
			Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
				Kelurahan Cakranegara Barat	15.235.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara		
				Kelurahan Cakranegara Barat	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
				Puskesmas Pejeruk	300.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase capaian rumah tangga sehat		
				Puskesmas Pejeruk	7.900.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Pejeruk		
				Puskesmas Pejeruk	999.255.541,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			IKM Puskesmas		
				Puskesmas Babakan	300.000,00
			IKM RSUD Kota Mataram		
				Puskesmas Babakan	300.000,00
			Persentase Fasyankes yang terakreditasi		
				Puskesmas Babakan	300.000,00
			Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan		
				Puskesmas Babakan	300.000,00
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
				Puskesmas Babakan	300.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase capaian rumah tangga sehat		
				Puskesmas Babakan	9.900.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan Puskesmas Babakan		
				Puskesmas Babakan	1.170.959.201,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
				Puskesmas Karang Pule	300.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase capaian rumah tangga sehat		
				Puskesmas Karang Pule	1.100.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan dinas kesehatan kota mataram		
				Puskesmas Karang Pule	1.876.573.654,00
			Indeks kepuasan pelayanan DPPKB Kota Mataram		
				Puskesmas Karang Pule	1.876.573.654,00
			Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas karang Pule		
				Puskesmas Karang Pule	1.876.573.654,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
				Puskesmas Cakranegara	300.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase capaian rumah tangga sehat		
				Puskesmas Cakranegara	14.569.065,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Cakranegara		
				Puskesmas Cakranegara	2.379.420.910,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
				Puskesmas Dasan Agung	300.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase capaian rumah tangga sehat		
				Puskesmas Dasan Agung	14.150.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Dasan Agung		
				Puskesmas Dasan Agung	731.816.893,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Puskesmas Mataram	300.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase capaian rumah tangga sehat		
				Puskesmas Mataram	16.100.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Mataram		
				Puskesmas Mataram	1.590.818.366,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
				Puskesmas Selaparang	300.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase capaian rumah tangga sehat		
				Puskesmas Selaparang	7.855.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Selaparang		
				Puskesmas Selaparang	1.033.323.909,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
				Puskesmas Tanjung Karang	300.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase capaian rumah tangga sehat		
				Puskesmas Tanjung Karang	4.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Tanjung Karang		
				Puskesmas Tanjung Karang	1.556.562.019,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
				Puskesmas Pagesangan	300.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase capaian rumah tangga sehat		
				Puskesmas Pagesangan	14.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Pagesangan		
				Puskesmas Pagesangan	1.408.612.724,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
				Puskesmas Ampenan	300.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase capaian rumah tangga sehat		
				Puskesmas Ampenan	7.900.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Ampenan		
				Puskesmas Ampenan	1.669.072.659,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
				Puskesmas Karang Taliwang	300.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase capaian rumah tangga sehat		
				Puskesmas Karang Taliwang	13.990.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Karang Taliwang		
				Puskesmas Karang Taliwang	1.683.584.124,00
			Indeks Kepuasan pelayanan dinas perdagangan kota mataram		
				UPTD Pasar	83.144.190,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase ketercapaian implementasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan		
				SPNF SKB Mataram	241.669.981,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Mataram		
				SPNF SKB Mataram	21.600.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pendidikan		
				SPNF SKB Mataram	21.600.000,00
<b>6</b>	<b>Peningkatan Komitmen dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (PD-6)</b>				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Fasyankes dengan status akreditasi utama		
				DINAS KESEHATAN	0,00
			Persentase Fasyankes yang terakreditasi		
				DINAS KESEHATAN	0,00
			Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
				DINAS KESEHATAN	0,00
			Persentase Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi Rumah Sakit		
				RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	30.395.938.078,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Pelayanan RSUD Kota Mataram		
				RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	2.514.150.000,00
			Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas PKP		
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.843.006,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Kelurahan Tangguh Bencana		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00
<b>7</b>	<b>Peningkatan Daya Saing Daerah (PD-7)</b>				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase Bangunan yang memenuhi sertifikat laik fungsi (SLF)		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	32.339.520,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.633.876.497,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase tenaga terampil bersertifikat		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.192.990,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Rata-Rata Lama Tinggal		
				DINAS PARIWISATA	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisatawan		
				DINAS PARIWISATA	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI		
				DINAS PARIWISATA	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Pertumbuhan omzet pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif		
				DINAS PARIWISATA	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan pelayanan dinas pariwisata		
				DINAS PARIWISATA	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			persentase sarana pertanian yang disediakan		
				DINAS PERTANIAN	488.189.744,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase Ketersediaan Data Sektor Perdagangan		
				DINAS PERDAGANGAN	32.402.480,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Indeks Sarana Distribusi Perdagangan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERDAGANGAN	149.969.504,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Presentase Rata Rata Peningkatan Harga Barang pokok dan Barang Penting		
				DINAS PERDAGANGAN	16.846.323,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Prosentase produk unggulan daerah yang menjadi komoditas ekspor		
				DINAS PERDAGANGAN	23.056.466,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Tingkat Pemenuhan Parameter Daerah Tertib Ukur		
				DINAS PERDAGANGAN	98.560.271,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Tingkat Ketermanfaatan Produk Lokal		
				DINAS PERDAGANGAN	333.633.744,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan pelayanan dinas perdagangan kota mataram		
				DINAS PERDAGANGAN	17.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Capaian Kenaikan Realisasi PAD dibanding tahun sebelumnya		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	27.150.000,00
			Kemandirian Keuangan Daerah		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				BADAN KEUANGAN DAERAH	27.150.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Indeks Sarana Distribusi Perdagangan		
				UPTD Pasar	0,00

### 3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan kemajuan yang dicapai pada tahun 2022, perkiraan tahun 2023 dan tantangan maupun target tahun 2024 serta diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu *“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”* dengan fokus pembangunan diarahkan Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kepada Pemulihan Industri, Penanggulangan pengangguran, Peningkatan SDM, Pemulihan dunia usaha, Pembangunan rendah karbon, revitalisasi Industri, Percepatan pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Ibu Kota negara. Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2024 yaitu *“Peningkatan Produktivitas Daerah untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi melalui Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Berkualitas”* maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam MPBM RKPD Kota Mataram Tahun 2024 adalah:

*“Mendorong Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan didukung Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Infrastruktur Berkualitas Menuju MATARAM HARUM”*

Selanjutnya, keterkaitan prioritas pembangunan kota, program prioritas dan program pembangunan Kota Mataram tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Mempertahankan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah					
		---					
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum kota yang tertangani			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	58.750.000,00	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Kelurahan Tangguh Bencana			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30.796.090,00	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Persentase Respon Time Kebakaran (15 Menit)			
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1.399.125.017,00	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Persentase potensi kasus pelanggaran ideologi pancasila yang dapat dicegah			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	448.820.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase potensi konflik politik yang dapat dicegah			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	19.609.733.438,00	
				Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/pemilukada			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	19.609.733.438,00	
				Tingkat pemahaman masyarakat dalam proses demokrasi			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	19.609.733.438,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase ormas yang aktif dan taat pada peraturan perundang-undangan			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	41.399.729,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase konflik sosial yang tertangani			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1.751.007.300,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Pelayanan Bakesbangpol			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	645.004.850,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran			
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN	4.994.722.758,00	
<b>2</b>	<b>Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Ekonomi</b>						
		---					
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.040.627.165,00	
				Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Sesuai Standar			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.040.627.165,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase akses air minum yang layak dan aman			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	233.993.578,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase rumah tangga dengan pengelolaan air limbah domestik			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.268.640.091,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.633.876.497,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau			
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	430.865.505,00	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Luas Kawasan Kumuh			
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	59.666.230.000,00	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
				Persentase Penanganan kawasan tidak kumuh			
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	700.525.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Rasio fatalitas per 10.000 kendaraan			
					DINAS PERHUBUNGAN	528.404.669,00	
				Rasio konektivitas kota			
					DINAS PERHUBUNGAN	528.404.669,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Rasio Waktu Tempuh				
					DINAS PERHUBUNGAN	528.404.669,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Indeks Infrastruktur Wilayah				
					DINAS PERHUBUNGAN	682.444.589,00		
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan				
					DINAS PERHUBUNGAN	682.444.589,00		
				Indeks Kepuasan Pelayanan RSUD Kota Mataram				
					RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	9.066.600.000,00		
<b>3</b>	<b>Pembangunan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter</b>							
		---						
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Persentase ketercapaian implementasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan				
					DINAS PENDIDIKAN	17.817.534.548,00		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Fasyankes yang terakreditasi				
					DINAS KESEHATAN	4.455.504.718,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial				
					DINAS SOSIAL	435.102.339,00		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase PMKS yang dapat berfungsi sosial secara wajar				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS SOSIAL	1.693.031.525,00	
				Persentase PMKS yang dapat berfungsi sosial secara wajar			
					DINAS SOSIAL	704.878.789,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase PMKS yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial			
					DINAS SOSIAL	4.041.816.076,00	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Mataram			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	741.862.725,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	132.817.244,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
				Persentase perempuan kepala keluarga kategori miskin yang terlatih PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan)			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	362.133.818,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Persentase ketersediaan data gender dan anak			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	124.246.563,00	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Persentase Kelurahan Layak Anak			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	899.999.999,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penyelesaian kasus pengaduan kekerasan terhadap anak			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	315.982.713,00	
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
				Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH Konsumsi)			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	752.936.791,00	
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
				Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	83.759.879,00	
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
				Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diawasi Keamanannya			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	155.903.360,00	
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
				Age Specific Fertility Rate (ASFR)			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	221.866.500,00	
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
				Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contracepsi Prevalence Rate/m. CPR)			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.096.279.000,00	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.096.279.000,00	
				Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.096.279.000,00	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Keluarga Pra Sejahtera			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.442.900.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				---			
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
				---			
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
				---			
					DINAS PENDIDIKAN	0,00	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				IKM PERPUSTAKAAN			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	849.992.401,00	
			TINGKAT KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN PER HARI				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	849.992.401,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	7.687.600,00	
				Indeks kepuasan pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	470.626.530,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Mataram			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENDIDIKAN	333.330.643.855,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pendidikan			
					DINAS PENDIDIKAN	333.330.643.855,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Sosial Kota Mataram			
					DINAS SOSIAL	4.223.581.868,00	
				Indeks kepuasan pelayanan DPPKB Kota Mataram			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.164.469.163,00	
				Indeks kepuasan pelayanan SKPD			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	53.664.500,00	
<b>4</b>	<b>Penguatan Mitigasi Bencana</b>						
		---					
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.724.928.545,00	
				Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Sesuai Standar			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.724.928.545,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Persentase saluran drainase dalam kondisi baik			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.384.200.498,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan dan Jaminan Sosial			
					DINAS SOSIAL	221.571.500,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan dan Jaminan Sosial			
					DINAS SOSIAL	80.026.959,00	
<b>5</b>	<b>Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik</b>						
		---					
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang dipenuhi oleh perusahaan			
					DINAS TENAGA KERJA	38.190.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Nilai aspek layanan publik berbasis elektronik			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.381.402.908,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Nilai Aspek 6 Audit TIK			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.102.999.680,00	
				Nilai Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.102.999.680,00	
				Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.102.999.680,00	
				Nilai Aspek Penyelenggara SPBE			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.102.999.680,00	
				Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.102.999.680,00	
				Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.102.999.680,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	414.997.207,00	
				Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	414.997.207,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Nilai aspek audit TIK			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	249.999.766,00	
				Nilai aspek kebijakan internal terkait tata Kelola SPBE			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	249.999.766,00	
				Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	249.999.766,00	
				Nilai aspek penyelenggaraan SPBE			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	249.999.766,00	
				Nilai Aspek Penyelenggaraan SPBE			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	249.999.766,00	
				Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	249.999.766,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Jumlah pengguna Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	132.034.408,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				"Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis dan Pengelolaan Arsip Dinamis			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	55.017.985,00	
				Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis dan Pengelolaan Arsip Dinamis.			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	89.434.747,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Kematangan UKPBJ			
					SEKRETARIAT DAERAH	868.630.923,00	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				persentase program kerja DPRD terfasilitasi			
					SEKRETARIAT DPRD	25.485.500.325,00	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase ketepatan waktu perencanaan (P2)			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.494.699.492,00	
				Persentase ketercapaian target tujuan dan sasaran daerah (P5)			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.782.441.800,00	
				Persentase ketersediaan data perencanaan (P1)			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.192.758.769,00	
				Persentase konsistensi anatara dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat kota (P3.1)			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.494.699.492,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase kesesuaian kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD (Renstra dan Renja)				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.300.300.051,00		
				Persentase konsistensi anatara dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat OPD (P3.2)				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.300.300.051,00		
				Persentase urusan pemerintahan yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.300.300.051,00		
				---				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.296.753.885,00		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Nilai Disiplin ASN				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	460.310.948,00		
				Nilai Kinerja ASN				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	703.958.817,00		
				Nilai Kompetensi ASN				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.719.705.461,00		
				Nilai Kualifikasi ASN				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	894.187.189,00		
				persentase penyelesaian pengajuan data kepegawaian/ administrasi kepegawaian tepat waktu				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	894.187.189,00		
				persentase penyelesaian pengajuan data kepegawaian/administrasi kepegawaian tepat waktu				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	703.958.817,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase inovasi yang memenuhi satuan indikator inovasi daerah Kota Mataram				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	450.788.980,00		
				Persentase Rekomendasi Majelis Kelitbangan terhadap produk kajian yang ditindaklanjuti				
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	578.837.274,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase OPD dengan Katagori SAKIP Sangat Baik				
					INSPEKTORAT DAERAH	1.782.073.182,00		
				Persentase penjaminan atas kualitas dokumen LPPD telah sesuai ketentuan				
					INSPEKTORAT DAERAH	891.036.591,00		
				Persentase Penjaminan Kualitas atas dokumen rancangan akhir RKPD dan RKPD Perubahan telah sesuai ketentuan				
					INSPEKTORAT DAERAH	891.036.591,00		
				Persentase Penjaminan Kualitas atas dokumen rancangan akhir RPJMD sesuai ketentuan				
					INSPEKTORAT DAERAH	891.036.591,00		
				Persentase penjaminan kualitas atas dokumen rancangan KUAPPAS dan KUPA-PPAS perubahan telah sesuai ketentuan				
					INSPEKTORAT DAERAH	891.036.591,00		
				Persentase penjaminan kualitas atas dokumen RKA dan RKPA PD telah sesuai ketentuan				
					INSPEKTORAT DAERAH	891.036.591,00		
				Persentase rekomendasi temuan eksternal Yang terselesaikan				
					INSPEKTORAT DAERAH	891.036.591,00		
				Persentase rekomendasi temuan internal yang terselesaikan				
					INSPEKTORAT DAERAH	891.036.591,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				'Persentase tindak lanjut atas jumlah rekomendasi temuan dan nilai pengembalian keuangan pemeriksaan eksternal			
					INSPEKTORAT DAERAH	891.036.591,00	
				Persentase tindak lanjut atas jumlah rekomendasi temuan dan nilai pengembalian keuangan pemeriksaan internal			
					INSPEKTORAT DAERAH	891.036.591,00	
				Persentase tindak lanjut evaluasi SAKIP Kota dan OPD			
					INSPEKTORAT DAERAH	891.036.591,00	
				---			
					INSPEKTORAT DAERAH	1.137.365.540,00	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				---			
					INSPEKTORAT DAERAH	872.198.115,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				IKM Kecamatan			
					KECAMATAN CAKRANEGARA	205.482.144,00	
					KECAMATAN MATARAM	530.155.000,00	
					KECAMATAN SANDUBAYA	216.352.500,00	
					KECAMATAN SELAPARANG	300.999.900,00	
				IKM Kecamatan			
					KECAMATAN SELAPARANG	22.481.300,00	
				IKM Kelurahan			
					KECAMATAN AMPENAN	7.070.975,00	
				IKM Kelurahan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN AMPENAN	40.517.080,00	
					KECAMATAN CAKRANEGARA	201.369.544,00	
					KECAMATAN MATARAM	531.455.000,00	
					KECAMATAN SANDUBAYA	216.352.500,00	
					KECAMATAN SELAPARANG	323.481.200,00	
				IKM Kelurahan			
					KECAMATAN AMPENAN	10.673.256,00	
				Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan			
					KECAMATAN CAKRANEGARA	201.369.544,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Jumlah kelurahan berpredikat swasembada			
					KECAMATAN MATARAM	705.809.482,00	
				Persentase kelurahan berpredikat swasembada			
					KECAMATAN SELAPARANG	6.499.900,00	
				persentase kelurahan berkategori berkembang			
					KECAMATAN CAKRANEGARA	7.266.735.893,00	
					KECAMATAN SEKARBELA	3.628.571.125,00	
				persentase kelurahan berkategori cepat berkembang			
					KECAMATAN SANDUBAYA	449.393.500,00	
				persentase kelurahan berkategori cepat berkembang			
					KECAMATAN MATARAM	705.809.482,00	
					KECAMATAN SANDUBAYA	4.362.120.804,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN SELAPARANG	5.395.897.915,00	
					Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
					KECAMATAN SELAPARANG	2.173.190.367,00	
					Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang		
					KECAMATAN SELAPARANG	6.499.900,00	
					Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
					KECAMATAN AMPENAN	3.983.178.709,00	
					KECAMATAN SELAPARANG	543.068.520,00	
					Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang		
					KECAMATAN CAKRANEGARA	7.266.735.893,00	
					persentase kelurahan berpredikat swasembada		
					KECAMATAN SANDUBAYA	3.114.692.095,00	
					KECAMATAN SELAPARANG	5.395.897.915,00	
					Persentase kelurahan berpredikat swasembada		
					KECAMATAN SANDUBAYA	1.696.822.209,00	
					KECAMATAN SELAPARANG	2.173.190.367,00	
					Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
					KECAMATAN AMPENAN	477.603.222,00	
					Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada		
					KECAMATAN AMPENAN	3.505.575.487,00	
					KECAMATAN CAKRANEGARA	7.266.735.893,00	
					KECAMATAN SELAPARANG	543.068.520,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Persentase kelurahan berpredikat swasembada kategori lanjut				
					KECAMATAN SEKARBELA	3.628.571.125,00		
				---				
					KECAMATAN SELAPARANG	0,00		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				persentase kelurahan berkategori cepat berkembang				
					KECAMATAN SELAPARANG	0,00		
				Persentase konflik sosial yang terselesaikan				
					KECAMATAN SELAPARANG	212.531.300,00		
				Persentase konflik sosial yang terselesaikan.				
					KECAMATAN SELAPARANG	0,00		
				Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan.				
					KECAMATAN AMPENAN	136.481.044,00		
				Persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan				
					KECAMATAN SEKARBELA	270.131.188,00		
				Persentase Penyelesaian Permasalahan Tantribumlinmas di kecamatan				
					KECAMATAN CAKRANEGARA	367.846.778,00		
				Persentase penyelesaian permasalahan tribunlinmas di kecamatan				
					KECAMATAN SANDUBAYA	206.865.000,00		
				Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan				
					KECAMATAN SELAPARANG	0,00		
				Persentase permasalahan bidang trantib yang terselesaikan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN SELAPARANG	212.531.300,00	
				Persentase Permasalahan Bidang Trantib yang terselesaikan			
					KECAMATAN AMPENAN	136.481.044,00	
				---			
					KECAMATAN SELAPARANG	0,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				---			
					KECAMATAN SEKARBELA	0,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks kepuasan pelayanan Perangkat Daerah			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.516.213.354,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	90.000.000,00	
				Indeks kepuasan pelayanan BKPSDM Kota Mataram			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.634.568.233,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	3.332.730.685,00	
				Indeks Kepuasan pelayanan dinas perdagangan kota mataram			
					DINAS PERDAGANGAN	4.896.868.250,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja			
					DINAS TENAGA KERJA	2.853.636.736,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Inspektorat			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					INSPEKTORAT DAERAH	591.899.233,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan			
					KECAMATAN AMPENAN	3.000.000,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara			
					KECAMATAN CAKRANEGARA	2.528.968.419,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram			
					KECAMATAN MATARAM	78.469.000,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya			
					KECAMATAN SANDUBAYA	8.341.167.028,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela			
					KECAMATAN SEKARBELA	956.991.370,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan OPD			
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.379.068.277,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.386.268.730,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan RSUD Kota Mataram			
					RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	2.514.150.000,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD			
					SEKRETARIAT DPRD	34.679.108.280,00	
				Indeks kepuasan pelayanan SKPD			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.506.835.695,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	115.019.712,00	
				Nilai SAKIP Kecamatan			
					KECAMATAN SELAPARANG	273.857.250,00	
				NILAI SAKIP KECAMATAN			
					KECAMATAN SELAPARANG	1.745.863.120,00	
				NILAI SAKIP KECAMATAN			
					KECAMATAN SELAPARANG	8.862.519.996,00	
				Nilai SAKIP SKPD			
					KECAMATAN AMPENAN	1.366.206.772,00	
				Persentase Capaian Kinerja Aparatur			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	98.579.750,00	
				Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%			
					SEKRETARIAT DAERAH	1.642.261.442,00	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpenuhi			
					INSPEKTORAT DAERAH	278.750.000,00	
				Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik			
					SEKRETARIAT DAERAH	1.642.261.442,00	
				---			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.215.138.501,00	
					INSPEKTORAT DAERAH	8.539.906.782,00	
					KECAMATAN CAKRANEGARA	11.700.000,00	
					KECAMATAN MATARAM	73.016.380,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN SELAPARANG	195.000.000,00	
6	Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Ekonomi Kreatif						
		---					
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Persentase Bangunan yang memenuhi sertifikat laik fungsi (SLF)			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	370.251.415,00	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.129.468.800,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	32.783.800.869,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Persentase tenaga terampil bersertifikat			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	214.622.257,00	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi			
					DINAS TENAGA KERJA	3.346.513.827,00	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang dipenuhi oleh perusahaan			
					DINAS TENAGA KERJA	63.900.000,00	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Koperasi Cukup Sehat			
					DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	194.935.475,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				Persentase SDM Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas			
					DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	410.234.525,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Persentase Usaha mikro yang naik kelas			
					DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.115.378.800,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Persentase pertumbuhan omzet per UMKM			
					DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.077.511.950,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Rata-Rata Lama Tinggal			
					DINAS PARIWISATA	260.300.000,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				persentase sarana pertanian yang disediakan			
					DINAS PERTANIAN	1.023.360.131,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi baik			
					DINAS PERTANIAN	1.864.260.046,00	
				---			
					DINAS PERTANIAN	210.574.371,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH				
					DINAS PERTANIAN	101.988.810,00		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase Kelompok Tani Mandiri				
					DINAS PERTANIAN	290.999.728,00		
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Persentase Ketersediaan Data Sektor Perdagangan				
					DINAS PERDAGANGAN	165.273.636,00		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Indeks Sarana Distribusi Perdagangan				
					DINAS PERDAGANGAN	90.913.712.720,00		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Presentase Rata Rata Peningkatan Harga Barang pokok dan Barang Penting				
					DINAS PERDAGANGAN	631.943.827,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Prosentase produk unggulan daerah yang menjadi komoditas ekspor				
					DINAS PERDAGANGAN	23.056.466,00		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Tingkat Pemenuhan Parameter Daerah Tertib Ukur				
					DINAS PERDAGANGAN	700.000.178,00		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tingkat Ketermanfaatan Produk Lokal			
					DINAS PERDAGANGAN	333.633.744,00	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri			
					DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	22.766.270.252,00	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				---			
					DINAS TENAGA KERJA	15.499.851,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan pelayanan dinas perdagangan kota mataram			
					DINAS PERDAGANGAN	1.897.375.590,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM			
					DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.712.381.248,00	
				Persentase kepuasan pelayanan SKPD			
					DINAS PERTANIAN	10.790.688.589,00	
				---			
					DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.287.208,00	
<b>7</b>	<b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam</b>						
		---					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				persentase luas peruntukan lahan existing yang sesuai dengan RTRW			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	930.719.408,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pemanfaatan Pola Ruang Yang Sesuai RTR			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	457.119.878,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase Penanganan Sampah			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.249.100.075,00	
				Persentase Pengurangan Sampah			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.249.100.075,00	
8	[object Object]						
		---					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Persentase ketercapaian implementasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan			
					DINAS PENDIDIKAN	101.208.773.617,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
				Persentase sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulum			
					DINAS PENDIDIKAN	159.999.708,00	
9	[object Object]						
		---					
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Persentase kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan			
					DINAS PENDIDIKAN	538.728.294,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				
				Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi standar pendidikan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENDIDIKAN	159.999.839,00	
10	[object Object]						
		---					
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
					IKM Puskesmas		
					DINAS KESEHATAN	223.934.500,00	
11	[object Object]						
		---					
					DINAS KESEHATAN	244.234.080,00	
12	[object Object]						
		---					
					IKM RSUD Kota Mataram		
					DINAS KESEHATAN	223.934.500,00	
13	[object Object]						
		---					
					DINAS KESEHATAN	244.234.080,00	
14	[object Object]						
		---					
					Indeks kepuasan pelayanan Instalasi Famasi Kesehatan		
					DINAS KESEHATAN	722.421.097,00	
					Indeks kepuasan pelayanan Laboratorium Kesehatan		
					DINAS KESEHATAN	4.721.941.739,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Fasyankes dengan status akreditasi utama			
					DINAS KESEHATAN	40.486.523.007,00	
				Persentase Fasyankes yang terakreditasi			
					DINAS KESEHATAN	3.218.243.400,00	
15	[object Object]						
		---					
					DINAS KESEHATAN	244.234.080,00	
16	[object Object]						
		---					
				Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan			
					DINAS KESEHATAN	223.934.500,00	
17	[object Object]						
		---					
					DINAS KESEHATAN	244.234.080,00	
18	[object Object]						
		---					
				Persentase Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi Rumah Sakit			
					RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	267.740.938.078,00	
19	[object Object]						
		---					
					RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	165.517.000.000,00	
20	[object Object]						

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		---					
				Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
					DINAS KESEHATAN	44.976.680.078,00	
21	[object Object]						
		---					
					DINAS KESEHATAN	244.234.080,00	
22	[object Object]						
		---					
					DINAS KESEHATAN	176.910.490,00	
23	[object Object]						
		---					
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar			
					DINAS KESEHATAN	1.166.151.589,00	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Persentase sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes yang memiliki ijin			
					DINAS KESEHATAN	989.025.837,00	
				Persentase TPM yang memiliki Izin			
					DINAS KESEHATAN	989.025.837,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase capaian rumah tangga sehat			
					DINAS KESEHATAN	732.539.735,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
24	[object Object]							
		---						
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau				
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	144.437.321,00		
				Rasio kepemilikan rumah				
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.156.654.120,00		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Luas Kawasan Kumuh				
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	113.779.788,00		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai				
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	39.798.988.770,00		
25	[object Object]							
		---						
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum kota yang tertangani				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.665.985.137,00		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Kelurahan Tangguh Bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	580.028.655,00		
26	[object Object]							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		---					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH Konsumsi)			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	614.142.860,00	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Persentase Daerah Rawan Pangan Yang Tertangani			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	
				Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani			
					DINAS KETAHANAN PANGAN	81.240.000,00	
27	[object Object]						
		---					
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
				Tingkat tertib administrasi pertanahan			
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52.999.791,00	
28	[object Object]						
		---					
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	71.499.800,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase pengurangan luas kawasan tercemar			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.582.738.007,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase luas RTH publik				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.289.041.100,00		
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah B3 yang disimpan sementara				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	47.254.000,00		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase jumlah usaha da/ atau kegiatan yang taat terhadap dokumen persetujuan lingkungan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	92.828.000,00		
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Presentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	90.900.000,00		
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Sesuai SOP				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	530.500.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase Penanganan Sampah				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.589.610.260,00		
				Persentase Pengurangan Sampah				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.589.610.260,00		
29	[object Object]							
		---						

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Cakupan kepemilikan akta kelahiran				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	445.578.700,00		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Cakupan kepemilikan KTP-el				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	319.960.050,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Nilai kepuasan layanan pemanfaatan data kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	424.085.000,00		
				Tingkat akurasi/keabsahan data dokumen administrasi kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	212.042.500,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				---				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.600.000,00		
<b>30</b>	<b>[object Object]</b>							
		---						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Rasio fatalitas per 10.000 kendaraan				
					DINAS PERHUBUNGAN	31.920.826.938,00		
				Rasio konektivitas kota				
					DINAS PERHUBUNGAN	31.920.826.938,00		
				Rasio Waktu Tempuh				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PERHUBUNGAN	31.920.826.938,00	
31	[object Object]						
		---					
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Persentase investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	57.726.429,00	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	3.271.424,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Indeks Kemudahan Ijin Berusaha			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	798.467.174,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase serapan tenaga kerja sektor ekonomi unggulan			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	322.146.995,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	66.852.650,00	
32	[object Object]						
		---					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase Pemuda yang Aktif didalam Organisasi Kepemudaan			
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.663.000.516,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)			
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.901.724.147,00	
				---			
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	496.918.128,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Persentase Organisasi Kepramukaan			
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	300.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Persentase obyek pemajuan budaya yang dikembangkan			
					DINAS PENDIDIKAN	1.887.227.182,00	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				IKM PERPUSTAKAAN			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	418.851.382,00	
				TINGKAT KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN PER HARI			
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	418.851.382,00	
33	[object Object]						
		---					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pertumbuhan nilai tambah perikanan tangkap			
					DINAS PERIKANAN	1.669.113.769,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya			
					DINAS PERIKANAN	2.709.983.026,00	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Pertumbuhan Nilai tambah hasil perikanan yang diolah / dipasarkan			
					DINAS PERIKANAN	893.386.196,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Rata-Rata Lama Tinggal			
					DINAS PARIWISATA	24.367.860.167,00	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisatawan			
					DINAS PARIWISATA	1.855.500.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
				Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI			
					DINAS PARIWISATA	441.819.900,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Pertumbuhan omzet pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			
					DINAS PARIWISATA	3.846.267.900,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				persentase sarana pertanian yang disediakan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PERTANIAN	637.009.212,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase prasarana pertanian yang tersedia dalam kondisi baik			
					DINAS PERTANIAN	0,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH			
					DINAS PERTANIAN	17.999.788,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase bencana pertanian yang dikendalikan			
					DINAS PERTANIAN	24.259.964,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase Kelompok Tani Mandiri			
					DINAS PERTANIAN	0,00	
<b>34</b>	<b>[object Object]</b>						
		---					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Nilai LPPD			
					SEKRETARIAT DAERAH	39.886.067.419,00	
				Persentase rata-rata Capaian SPM			
					SEKRETARIAT DAERAH	39.886.067.419,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase BUMD dengan tingkat kesehatan berkategori AA			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					SEKRETARIAT DAERAH	740.890.082,00	
				Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Tinggi			
					SEKRETARIAT DAERAH	128.734.148,00	
				Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Perencanaan			
					SEKRETARIAT DAERAH	777.872.150,00	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase ketercapaian target tujuan dan sasaran daerah (P5)			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	490.794.678,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				persentase kesesuaian APBD dengan RKPD			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	1.869.830.820,00	
				Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	164.024.000,00	
				Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	967.396.380,00	
				persentase penyerapan APBD			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	470.270.920,00	
				---			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	9.041.350.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				nilai solvabilitas layanan			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	8.161.786.830,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase laporan BMD tahunan OPD tepat waktu			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	8.161.786.830,00	
35	[object Object]						
		---					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Capaian Kenaikan Realisasi PAD dibanding tahun sebelumnya			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	8.844.490.570,00	
				Kemandirian Keuangan Daerah			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	8.844.490.570,00	
36	[object Object]						
		---					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				IKM Kecamatan			
					KECAMATAN AMPENAN	288.200.810,00	
					KECAMATAN MATARAM	153.890.174,00	
					KECAMATAN SEKARBELA	185.762.414,00	
				IKM Kelurahan			
					KECAMATAN AMPENAN	312.633.097,00	
					KECAMATAN MATARAM	153.890.174,00	
					KECAMATAN SEKARBELA	185.762.414,00	
				Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan			
					KECAMATAN SEKARBELA	185.762.414,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Jumlah kelurahan berpredikat swasembada				
					KECAMATAN MATARAM	5.601.007.258,00		
				persentase kelurahan berkategori berkembang				
					KECAMATAN SEKARBELA	1.109.735.633,00		
				persentase kelurahan berkategori cepat berkembang				
					KECAMATAN MATARAM	5.601.007.258,00		
				Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang				
					KECAMATAN AMPENAN	2.939.890.966,00		
				Persentase Kelurahan Berpredikat Swasembada				
					KECAMATAN AMPENAN	2.939.890.966,00		
				Persentase kelurahan berpredikat swasembada kategori lanjut				
					KECAMATAN SEKARBELA	1.109.735.633,00		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase konflik sosial yang terselesaikan				
					KECAMATAN MATARAM	282.872.314,00		
				Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan.				
					KECAMATAN AMPENAN	162.097.696,00		
				Persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan				
					KECAMATAN SEKARBELA	246.340.976,00		
				Persentase penyelesaian permasalahan tratibunlinmas di kecamatan				
					KECAMATAN MATARAM	282.872.314,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Permasalahan Bidang Trantib yang terselesaikan			
					KECAMATAN AMPENAN	162.097.696,00	
37	[object Object]						
		---					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase potensi konflik antar umat beragama yang dapat dicegah			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	302.630.545,00	
38	[object Object]						
		---					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Infrastruktur Wilayah			
					DINAS PERHUBUNGAN	8.727.908.855,00	
39	[object Object]						
		---					
				Indeks Kepuasan Pelayanan DPMPSTSP Kota Mataram			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	6.913.977.950,00	
40	[object Object]						
		---					
				Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)			
					BADAN KEUANGAN DAERAH	43.053.586.981,00	
41	[object Object]						
		---					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Kepuasan Pelayanan Bakesbangpol			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	2.720.348.879,00	
42	[object Object]						
		---					
				Indeks Kepuasan Pelayanan Bappeda			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.414.935.201,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan BPBD			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.055.667.621,00	
No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		---					
				Indeks kepuasan pelayanan dinas kesehatan kota mataram			
					DINAS KESEHATAN	58.062.871.272,00	
44	[object Object]						
		---					
					DINAS KESEHATAN	2.519.140.188,00	
45	[object Object]						
		---					
				Indeks kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	259.574.095,00	
46	[object Object]						
		---					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks kepuasan pelayanan dinas pariwisata			
					DINAS PARIWISATA	3.213.130.089,00	
47	[object Object]						
		---					
				Indeks kepuasan pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.712.549.682,00	
48	[object Object]						
		---					
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Mataram			
					DINAS PENDIDIKAN	715.237.812,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pendidikan			
					DINAS PENDIDIKAN	715.237.812,00	
				Indeks Kepuasan pelayanan dinas perdagangan kota mataram			
					DINAS PERDAGANGAN	99.431.284,00	
49	[object Object]						
		---					
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan			
					DINAS PERHUBUNGAN	8.727.908.855,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas PKP			
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.468.525.595,00	
50	[object Object]						
		---					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Sosial Kota Mataram			
					DINAS SOSIAL	24.600.000,00	
51	[object Object]						
		---					
				Indeks Kepuasan Pelayanan Disdukcapil Kota Mataram			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.924.120.897,00	
52	[object Object]						
		---					
				Indeks kepuasan pelayanan DPPKB Kota Mataram			
					DINAS KESEHATAN	1.876.573.654,00	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.304.892.633,00	
53	[object Object]						
		---					
				Indeks Kepuasan Pelayanan Inspektorat			
					INSPEKTORAT DAERAH	22.210.080,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Ampenan			
					KECAMATAN AMPENAN	46.312.068,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara			
					KECAMATAN CAKRANEGARA	8.284.138.859,00	
54	[object Object]						
		---					
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN MATARAM	16.920.000,00	
55	[object Object]						
		---					
					KECAMATAN MATARAM	10.078.276.134,00	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela			
					KECAMATAN SEKARBELA	4.811.547.833,00	
56	[object Object]						
		---					
				Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Ampenan			
					DINAS KESEHATAN	1.669.072.659,00	
				Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Cakranegara			
					DINAS KESEHATAN	2.379.420.910,00	
				Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Dasan Agung			
					DINAS KESEHATAN	731.816.893,00	
				Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Karang Pule			
					DINAS KESEHATAN	1.876.573.654,00	
				Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Karang Taliwang			
					DINAS KESEHATAN	1.683.584.124,00	
				Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Mataram			
					DINAS KESEHATAN	1.590.818.366,00	
				Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Pagesangan			
					DINAS KESEHATAN	1.408.612.724,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Pejeruk			
					DINAS KESEHATAN	999.255.541,00	
				Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Selaparang			
					DINAS KESEHATAN	1.033.323.909,00	
				Indeks kepuasan pelayanan kesehatan Puskesmas Tanjung Karang			
					DINAS KESEHATAN	1.556.562.019,00	
				Indeks kepuasan pelayanan Puskesmas Babakan			
					DINAS KESEHATAN	1.170.959.201,00	
<b>57</b>	<b>[object Object]</b>						
		---					
				Indeks Kepuasan Pelayanan RSUD Kota Mataram			
					RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	221.818.302.905,00	
<b>58</b>	<b>[object Object]</b>						
		---					
				Indeks Kepuasan Pelayanan Satpol PP			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.123.047.495,00	
<b>59</b>	<b>[object Object]</b>						
		---					
				Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD			
					DINAS PERIKANAN	2.899.428.419,00	
				Nilai SAKIP			
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.453.051.410,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nilai SAKIP SKPD			
					KECAMATAN AMPENAN	8.979.801.314,00	
				Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%			
					SEKRETARIAT DAERAH	28.678.581.075,00	
				Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik			
					SEKRETARIAT DAERAH	28.678.581.075,00	
				Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlaksana			
					SEKRETARIAT DAERAH	122.797.452,00	
				Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlaksanan			
					SEKRETARIAT DAERAH	10.644.840,00	
				---			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	26.025.330,00	
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	
<b>60</b>	<b>[object Object]</b>						
		---					
					DINAS KESEHATAN	0,00	
<b>61</b>	<b>[object Object]</b>						
		---					
					DINAS PERHUBUNGAN	7.164.642.918,00	
<b>62</b>	<b>[object Object]</b>						
		---					
					KECAMATAN MATARAM	31.278.490,00	



# **BAB 4**

## **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

*Berisikan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer*

Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan ketentuan :

1. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
2. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

### **4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Usuran Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pada TA. 2021, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram, yaitu:

1. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
  - f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  - a. Tenaga Kerja;
  - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan Hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan Informatika;
  - k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  - l. Penanaman Modal;
  - m. Kepemudaan dan Olah raga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;

- p. Kebudayaan
  - q. Perpustakaan;
  - r. Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
- a. Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Perdagangan;
  - e. Perindustrian;
  - f. Transmigrasi.

Selain pelaksanaan urusan pemerintahan daerah diatas, Pemerintah Kota Mataram juga melaksanakan fungsi pendukung atau penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi:

- a. unsur pendukung, meliputi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
- b. unsur penunjang, meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- c. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- d. unsur kewilayahan yaitu kecamatan; dan
- e. unsur pemerintahan umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penyusunan anggaran belanja daerah Kota Mataram bertujuan untuk percepatan penanganan dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Pemenuhan terhadap Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) seiring dengan proyeksi pemulihan pascapandemi Covid-19 yang masih berlangsung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam rangka Mendukung kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, selain itu penyusunan anggaran belanja daerah juga tetap mempertimbangkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi

penggunaan alokasi anggaran tersebut. Kebijakan anggaran Belanja Daerah TA. 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif oleh karena itu kebijakan belanja pada tahun 2024 dijabarkan pada tabel 4.1 Plafon anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada akhir bahasan bab ini.

#### **4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, BUNGA,SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1) Belanja Operasi;

merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dirinci atas jenis:

a. belanja pegawai;

digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai pada APBD Kota Mataram Tahun 2024, dianggarkan untuk kebutuhan pembayaran: gaji pokok PNS dan PPPK serta tunjangan PNSD dan tunjangan PPPK, memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok serta tunjangan PNSD dan PPPK , pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, anggaran tambahan penghasilan PNSD berupa Tunjangan Penghasilan PNSD (TPP) selama 1 tahun; penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; Dana Alokasi Non Fisik.

b. belanja barang dan jasa;

digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. belanja bunga;

digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. belanja subsidi;

digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. belanja hibah;

diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

f. belanja bantuan sosial

digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, dialokasikan dengan mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Belanja Modal;

digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Belanja Tidak Terduga;

merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga TA. 2024 dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4) Belanja Transfer.

belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. belanja bagi hasil

b. belanja transfer

diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk bantuan keuangan kepada partai politik dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014.

Belanja Daerah pada APBD TA. 2024 ditargetkan sebesar **Rp. 2.220.077.137.974** yang diuraikan dalam plafon sementara SKPD berdasarkan urusan pemerintahan dan rincian plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 4.1**

Rincian Plafon SKPD berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1		2	3
1	1	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>455,818,144,855</b>
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	453,930,917,673
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan	1,887,227,182
1	2	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>136,478,610,913</b>
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	136,478,610,913
1	3	<b>RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM</b>	<b>666,656,990,983</b>
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	666,656,990,983
1	4	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>82,732,749,196</b>
		UW. Pelayanan Dasar Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82,732,749,196
1	5	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>108,388,568,569</b>
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	108,335,568,778
		UW. Bukan pelayanan Dasar Bidang Pertanahan	52,999,791

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1	2	3	
1	6	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>11,847,782,632</b>
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	11,847,782,632
1	7	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>6,393,847,775</b>
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	6,393,847,775
1	9	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>5,667,457,366</b>
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5,667,457,366
1	10	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>11,424,609,056</b>
		UW. Pelayanan Dasar Bidang Sosial	11,424,609,056
2	11	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	<b>6,317,740,414</b>
		UW. Bukan pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja	6,302,240,563
		Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi	15,499,851
2	12	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>5,760,219,274</b>
		UW. Bukan pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,760,219,274
2	13	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>	<b>5,028,401,175</b>
		UW. Bukan pelayanan Dasar bidang Ketahanan Pangan	5,028,401,175
2	14	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>51,064,951,282</b>
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup	51,064,951,282
2	15	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>5,911,302,147</b>
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatataan Sipil	5,911,302,147
2	16	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>12,230,407,296</b>
		Uw. Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Kependudukan Dan Keluarga Berencana	12,230,407,296
2	23	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>49,024,227,969</b>
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan	49,024,227,969
2	14	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	<b>7,879,212,377</b>
2	14	1 UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika	7,214,215,404
2	14	2 UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik	414,997,207
2	14	3 UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian	249,999,766
2	19	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>39,280,999,458</b>
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	16,514,729,206.00
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perindustrian	22,766,270,252

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1	2		3
2	26	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>8,162,442,622</b>
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal	8,162,442,622
2	27	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>11,814,694,201</b>
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11,814,694,201
2	28	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>6,931,599,653</b>
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan	5,662,755,870
		UW. Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan	1,268,843,783
2	29	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>8,171,911,410</b>
		UW. Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan	8,171,911,410
3	30	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>33,984,878,056</b>
		Urusan Pilihan Bidang Pariwisata	33,984,878,056
3	31	<b>DINAS PERTANIAN</b>	<b>14,961,140,639</b>
		Urusan Pilihan Bidang Pertanian	14,961,140,639
4	01	<b>DINAS PERDAGANGAN</b>	<b>99,661,295,695</b>
		Urusan Pilihan Bidang Perdagangan	99,661,295,695
4	02	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>73,003,888,902</b>
4	02	4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	73,003,888,902
		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>60,164,608,605</b>
5	01	5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	60,164,608,605
5	36	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>12,445,028,403</b>
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	12,445,028,403
5	37	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>72,662,736,501</b>
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	72,662,736,501
5	38	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH</b>	<b>8,952,419,700</b>
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian	8,952,419,700
5	39	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>4,408,694,531</b>
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	4,408,694,531
6	36	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>12,408,594,901</b>
		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	12,408,594,901
7	16	<b>KECAMATAN CAKRANEGARA</b>	<b>19,236,351,601</b>
		Unsur Kewilayahan	19,236,351,601
7	17	<b>KECAMATAN SANDUBAYA</b>	<b>13,698,290,972</b>
		Unsur Kewilayahan	13,698,290,972
7	18	<b>KECAMATAN MATARAM</b>	<b>17,353,405,830</b>
		Unsur Kewilayahan	17,353,405,830
7	19	<b>KECAMATAN SELAPARANG</b>	<b>19,728,592,908</b>

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1		2	3
		Unsur Kewilayahan	19,728,592,908
<b>7</b>	<b>20</b>	<b>KECAMATAN AMPENAN</b>	<b>17,947,550,909</b>
		Unsur Kewilayahan	17,947,550,909
<b>7</b>	<b>21</b>	<b>KECAMATAN SEKARBELA</b>	<b>10,953,844,457</b>
		Unsur Kewilayahan	10,953,844,457
<b>8</b>	<b>20</b>	<b>BAKESBANGPOLDAGRI</b>	<b>25,518,944,741</b>
		Unsur Pemerintahan Umum	25,518,944,741
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.220.077.137.974</b>

**Tabel 4.2**

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.445.291.803.717</b>
a.	Belanja Pegawai	668.080.716.300
b.	Belanja Barang dan Jasa	627.518.264.099
c.	Belanja Bunga	-
d.	Belanja Subsidi	-
e.	Belanja Hibah	132.583.947.674
f.	Belanja Bantuan sosial	17.108.875.644
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>765.743.984.257</b>
a.	Belanja Modal Tanah	22.960.974.544
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	304.537.007.829
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	354.807.171.485
d.	Belanja Modal, Jaringan dan Irigasi	83.024.861.099
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.000.000
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	193.969.300

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
3.	Belanja Tidak Terduga	7,000,000,000
4.	Belanja Transfer	2.041.350.000
a.	Belanja Bantuan Keuangan	2.041.350.000
	<b>TOTAL</b>	<b>2.220.077.137.974</b>

Sedangkan untuk dapat melihat plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/kegiatan dapat disampaikan dalam tabel 4.3

# BAB 5

## RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

*Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.*

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah terdiri atas:

A. penerimaan Pembiayaan;

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

a) SiLPA;

bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/ atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 atau 44,00 dari penerimaan pembiayaan TA. 2023 sebesar Rp. 14.000.000.000,00 yang diasumsikan seperti TA. 2023 yang bersumber dari efisiensi belanja.

b) pencairan Dana Cadangan;

digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;  
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
- d) penerimaan Pinjaman Daerah;  
didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. lembaga keuangan bank;
  - d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
  - e. masyarakat.
- e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;  
digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembiayaan:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;  
digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
- b. penyertaan modal daerah;  
penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.  
  
Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan Modal pada TA. 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 yang diperuntukkan bagi sambungan air bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. pembentukan Dana Cadangan;  
penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:

- a. DAK
- b. Pinjaman Daerah
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan atau masyarakat. Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah (3) diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan TA 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2024**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.250.000.000,00	

	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.250.000.000,00</b>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>22.750.000.000,00</b>	

## BAB 6 PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA 2024. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap PPAS.

Apabila terdapat perubahan atau pemberlakuan peraturan / perundang-undangan yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap kebijakan dalam dokumen ini, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Addendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram.

Mataram, 18 Agustus 2023

PIMPINAN DPRD  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MATARAM,

  
H. DIDI SUMARDI, SH  
KETUA

WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA

  
ABD. RACHMAN  
WAKIL KETUA

  
I WAYAN SUGIARTHA  
WAKIL KETUA